

ANALISA

1984—1

MELAKSANAKAN PANCASILA



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi

Daged JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
Pande Radja SILALAH
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
A. Sudiharto DJIWANDONO
J. Soedjati DJIWANDONO
Ronald NANGOI

Redaksi Pelaksana

Kirdi DIPOYUDO
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang 111/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489

PENGANTAR REDAKSI	2
PANCASILA MORAL BANGSA INDONESIA: ARTI FORMAL DAN MATERIALNYA <i>Kirdi DIPOYUDO</i>	5
PEMASYARAKATAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA <i>BABARI</i>	24
SUATU TINJAUAN FILSAFAT ATAS CITA-CITA NEGARA PANCASILA <i>Kirdi DIPOYUDO</i>	35
SUATU TINJAUAN ATAS KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA 1983 <i>M. DJADIJONO</i>	46
18 AGUSTUS 1945 TITIK TOLAK PEMAHAMAN PANCASILA <i>SUDIBJO</i>	57
KONSEP MANUSIA MENURUT PANCASILA <i>H. CAROKO</i>	68

Pengantar Redaksi

Seperti ditegaskan dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang kemudian disahkan oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi Dasar Negara RI. Hal ini terjadi pada 18 Agustus 1945 ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas nama Rakyat Indonesia secara bulat mengesahkan Pembukaan UUD 1945 setelah memusyawarakannya secara panjang lebar. Mufakat atau konsensus itu dicapai tidak hanya berkat kebesaran jiwa dan kesadaran yang mendalam akan perlunya persatuan bangsa di antara para pemimpin pergerakan dan cendekiawan nasional yang duduk dalam Panitia itu, melainkan juga karena Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang telah menjadi milik bersama yang mengandung jaminan-jaminan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, yaitu "melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Oleh sebab itu Pancasila bukan saja harus dibela dan diamankan sekuat tenaga, melainkan terutama juga dipahami, dihayati dan dilaksanakan, baik secara obyektif dalam peraturan-peraturan perundangan maupun secara subyektif dalam peri laku sehari-hari masing-masing orang Indonesia. "Pancasila bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, bukan dasar falsafah Negara yang sekedar dikeramatkan dalam dokumen Pembukaan UUD; melainkan Pancasila harus diamalkan. Tanpa diamalkan, apa pun dasar falsafah Negara yang kita pakai, apa pun konsepsi yang kita buat, tidak akan berguna dan tidak ada artinya," demikian ditegaskan oleh Pejabat Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967.

Sejak permulaan Orde Baru giat berusaha untuk melakukan hal itu dan telah mencapai banyak kemajuan. Berkat perjuangan Orde Baru itu, pada tahun 1978 MPR menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dalam ketetapanannya No. II/MPR/1978. Dalam ketetapan ini nilai-nilai Pancasila dijabarkan menjadi 36 norma sebagai pemuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kene-

garaan dan lembaga kemasyarakatan baik di Pusat maupun di Daerah. Dalam rangka pelaksanaannya, dengan Keputusan Presiden RI No. 10 tahun 1979 telah dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) yang bertugas untuk memasyarakatkannya. Dengan maksud itu BP-7 menyusun bahan pendidikan Pancasila dan menyelenggarakan penataran-penataran P-4, baik untuk pegawai negeri dan ABRI maupun untuk pemimpin-pemimpin masyarakat. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN, pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah dari TK sampai universitas. Sehubungan dengan itu pemerintah menyusun buku-buku PMP untuk SD sampai SMTA dan mewajibkannya di sekolah-sekolah.

Pemasyarakatan P-4 itu akan ditingkatkan lagi dalam Pelita IV yang akan mulai tahun ini. Dalam ketetapan No. II/MPR/1983 tentang GBHN, MPR telah menegaskan bahwa dalam rangka memantapkan kehidupan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memasyarakatkan P-4 melalui pendidikan, penataran dan usaha-usaha lain di seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan itu, Presiden Mandataris MPR telah memutuskan untuk meningkatkan pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam rangka pengembangan P-4 dan Demokrasi Pancasila sebagai salah satu krida Kabinet Pembangunan IV.

Ketetapan MPR tentang GBHN itu juga menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas politik bagi semua kekuatan sosial politik. Ini merupakan usaha untuk merampungkan secara tuntas adanya kesatuan pandangan dan sikap mengenai Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, yang selama ini terasa belum bulat dan tuntas. Selain itu dalam ketetapan yang sama MPR menegaskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. "Ini berarti bahwa titik berat perjuangan kita telah makin maju, yakni: dari pengamanan Pancasila ke pengamalan Pancasila," demikian penegasan Presiden Soeharto dalam pidatonya pada akhir tahun 1983.

Secara demikian kedudukan Pancasila menjadi semakin mantap. Jika pada tahun 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan dalam rangka pelaksanaannya pada tahun 1978 MPR menetapkan P-4 sebagai penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, maka pada tahun 1983 MPR menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua kekuatan sosial politik dan menyatakan tekadnya untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Maka dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN

tahun 1984/1985 pada Sidang DPR, dapat ditegaskan: "Di bidang ideologi kita telah memiliki konsensus nasional mengenai pengamalan Pancasila dengan adanya P-4, konsensus nasional mengenai satu-satunya asas Pancasila dan konsensus nasional mengenai tekad kita untuk mengamalkan Pancasila dalam pembangunan."

Semuanya itu sangat menggembirakan karena pelaksanaan Pancasila merupakan jaminan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional kita. Akan tetapi belum ada jaminan bahwa Pancasila akan benar-benar diamalkan dalam perilaku sehari-hari warga negara dan penyelenggara negara. Sehubungan dengan itu perlu diusahakan secara terus-menerus agar norma-norma yang dirumuskan dalam P-4 itu bukan saja dipahami tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu masih terasa suatu kekurangan yang besar. Kita belum mempunyai pedoman bagi pelaksanaan Pancasila dalam peraturan-peraturan perundangan. P-4 lebih berkaitan dengan pelaksanaan subyektif atau pengamalan Pancasila oleh masing-masing orang Indonesia, sedangkan pelaksanaan obyektifnya atau penguangannya dalam ketentuan-ketentuan hukum nasional belum mendapat perhatian yang memadai. Pancasila bukanlah semata-mata moral perorangan melainkan juga -- sebagai akibat penetapannya menjadi dasar negara -- moral negara, moral yang harus diamalkan oleh negara dan lembaga-lembaganya. Sehubungan dengan itu Pancasila perlu dijabarkan menjadi norma-norma hukum. Semua hukum peninggalan jaman kolonial yang masih berlaku sekarang ini harus segera mungkin dihapus dan diganti dengan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Pelaksanaan Pancasila baik obyektif maupun subyektif itulah tema kita bulan Januari 1984 ini. ANALISA menurunkan enam buah karangan sebagai sumbangan pemikiran untuk lebih memahami sila-sila Pancasila dalam rangka pelaksanaannya demi tercapainya tujuan-tujuan nasional kita, khususnya terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karangan yang pertama membahas arti formal dan material moral Pancasila. Yang kedua membicarakan usaha-usaha pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Karangan yang ketiga adalah suatu tinjauan filsafat mengenai cita-cita Negara Pancasila. Karangan berikutnya menyajikan suatu tinjauan atas kehidupan politik di Indonesia pada tahun 1983. Karangan yang kelima membicarakan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai titik tolak pemahaman Pancasila, sedangkan karangan yang keenam dan terakhir menyoroiti konsep manusia menurut Pancasila.

Pancasila Moral Bangsa Indonesia: Arti Formal dan Materialnya

Kirdi DIPOYUDO

PENGANTAR

Bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila adalah sangat penting karena merupakan pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah negara Indonesia. Lagi pula suatu penyelidikan yang lebih mendalam menunjukkan bahwa pandangan hidup yang telah menjadi dasar negara itu adalah satu *kesatuan bulat asas-asas budi pekerti atau moral, yang dapat disebut moral bangsa Indonesia*. Dengan demikian penetapan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar falsafah atau ideologi negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara.

Oleh sebab itu untuk memahami Pancasila dalam rangka penghayatan dan pelaksanaannya, kita tidak cukup membahasnya sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, melainkan harus juga memperhatikan bahwa *kelima sila itu adalah moral*. Selain itu kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan bulat. Kita dapat dan harus membedakannya satu sama lain, tetapi kita tidak boleh memisahkannya karena sila-sila itu saling membatasi dan saling memperkaya. Kelima sila itu adalah satu kesatuan gagasan-gagasan fundamental yang menyeluruh tentang kehidupan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat dan negara. Pancasila berlaku baik bagi perorangan maupun bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu Pancasila dapat dibedakan menjadi *moral perorangan* dan *moral sosial, termasuk moral negara*.

Sebagai *moral perorangan*, Pancasila mengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang

Maha Esa, dengan sesama manusia, dengan tanah air - nusa - bangsa Indonesia, dengan pemerintahan negara, dan dengan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat.

Sebagai *moral negara*, Pancasila menjadi sumber tertib negara dan tertib hukumnya. Sehubungan dengan itu moral Pancasila harus *dituangkan dalam UUD* yang menyusun negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugasnya masing-masing serta hubungan fungsional antara mereka, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara, hubungan warga negara dengan negara dan sebaliknya. Lebih lanjut dia harus dijabarkan dan dilaksanakan dalam *peraturan-peraturan perundangan bawahan* dan *kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah* yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Tetapi tidak semua kewajiban moral yang mengalir dari Pancasila dapat dan harus dijadikan undang-undang, melainkan hanya kewajiban-kewajiban moral yang mengatur tingkah laku lahiriah serta menyangkut hak-hak orang lain atau kepentingan umum. Kompetensi negara terbatas pada tertib lahiriah sesuai dengan jangkauan kekuasaannya. Batin atau hati manusia adalah di luar jangkauannya.

Dalam karangan ini moral Pancasila akan dibahas menurut *arti formal* maupun *materialnya* secara singkat. Secara berturut-turut akan dibicarakan arti Pancasila sebagai moral, moral bangsa Indonesia, moral perorangan maupun moral negara, dan arti sila masing-masing baik bagi perorangan maupun negara. Sebagai penutup akan diajukan beberapa kesimpulan yang menunjukkan pentingnya moral Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.

Tulisan ini dibuat khususnya sebagai tanggapan atas seruan yang berulang kali dikeluarkan oleh Presiden Soeharto agar kita bersama-sama memikirkan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam segala segi kehidupan dan tingkah laku kita sehari-hari. Seruan ini dikeluarkan berdasarkan pengakuan bahwa Pancasila belum dipahami dan belum dilaksanakan dengan baik, sehingga setelah sekian tahun merdeka bangsa Indonesia masih jauh dari tujuan-tujuan nasionalnya, khususnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

ARTI FORMAL MORAL PANCASILA

Pancasila adalah moral, moral bangsa Indonesia yang juga dapat disebut moral Pancasila. Moral Pancasila ini berlaku bagi orang Indonesia masing-masing maupun bagi negara. Selanjutnya dia adalah bagian inti kebudayaan nasional Indonesia dan dasar pengembangannya.

Pancasila adalah Moral

Baik menurut arti *etimologis* maupun *arti sebenarnya* Pancasila adalah satu kesatuan asas-asas budi pekerti atau moral. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dan terdiri atas dua kata, panca dan sila. Panca berarti lima dan sila asas atau kewajiban moral, sehingga Pancasila berarti *lima kewajiban moral*. Itulah arti sila dalam kesusasteraan Hindu kuno. Agama Budha bahkan mengenal istilah Pancasila dan Dasasila dalam arti yang sama. Dasasila adalah kesepuluh kewajiban moral untuk para bhiksu, sedangkan Pancasila adalah untuk para upasika dan meliputi lima larangan moral, yaitu larangan-larangan membunuh, mencuri, berzinah, berdusta dan menggunakan minuman keras. Arti sila sebagai asas moral itu juga terdapat dalam kesusasteraan Indonesia kuno. Pada pertengahan abad ke-14 misalnya, Prapanca memakai kata Pancasila dalam bukunya *Negarakertagama* dengan arti lima pantangan moral.¹

Juga menurut *arti sebenarnya* Pancasila adalah moral, terdiri atas lima norma moral, yaitu: "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial itu adalah moral sudah jelas. Mengenai persatuan Indonesia dan kerakyatan soalnya tidak begitu jelas, tetapi keduanya juga mempunyai segi moral dan mempunyai hubungan erat dengan moral. Baik dari pembicaraan-pembicaraan sekitar Proklamasi Kemerdekaan maupun dari rumusannya dalam Mukadimah UUD RIS dan Mukadimah UUD Sementara tahun 1950 adalah jelas bahwa persatuan Indonesia adalah sinonim dengan nasionalisme, sedangkan kerakyatan dalam arti pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat adalah juga suatu tuntutan moral.

Yang dimaksud dengan moral ialah *keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik jahatnya manusia dan sikap serta tingkah lakunya*. Norma-norma semacam itu disebut norma moral. Manusia dapat berbuat baik atau jahat, tetapi hanya boleh dan wajib berbuat baik. Agar baik, tingkah lakunya harus sesuai dengan norma-norma moral itu. Selain menentukan baik jahatnya tingkah laku, norma-norma moral itu juga memberikan perintah kepada manusia untuk melakukan sesuatu atau melarangnya berbuat sesuatu. Misalnya perintah "hormatilah orang tua" dan larangan "jangan memfitnah". Dengan mengenal norma-norma itu, manusia akan tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang harus dihindarinya. Perbuatan yang selaras

¹Lihat Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta, 1955), hal. 28.

dengan norma-norma itu adalah baik, yang melanggarnya jahat. Lagi pula karena sifatnya mengikat, norma moral merupakan suatu dorongan kuat kepada manusia ke arah yang baik. Orang yang biasa mematuhi norma-norma itu disebut baik secara moral (*morally good*) atau baik sebagai manusia.

Norma moral itu harus dibedakan dengan *norma sopan santun* dan *norma hukum* yang juga berlaku umum bagi setiap warga masyarakat. Norma sopan santun hanya berlaku berdasarkan kebiasaan atau konvensi dan norma hukum berlaku berdasarkan undang-undang atau kebiasaan tertentu, sedangkan norma moral bersumber pada kodrat manusia (*human nature*) dan oleh sebab itu selalu berlaku. Selanjutnya norma hukum pelaksanaannya dapat dipaksakan (*enforced*) dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan sanksi hukum oleh penguasa masyarakat, sedangkan norma moral pada dirinya sendiri tidak. Dalam bentrokan dengan lain-lain norma tingkah laku, *norma moral harus didahulukan*. Dengan demikian norma moral merupakan suatu kekuatan yang amat besar dalam hidup manusia. Pengaruhnya adalah lebih kuat daripada pendapat-pendapat masyarakat pada umumnya dan bahkan kehendak penguasa. Atas dasar norma moral orang mengambil sikap dan menilai lain-lain norma yang berlaku, termasuk undang-undang negara dan ketentuan-ketentuan atau perintah-perintah penguasa. Undang-undang negara bukan saja tidak boleh bertentangan dengan moral melainkan harus sesuai dengan moral dan dijiwai olehnya.

Pancasila adalah Moral Bangsa Indonesia

Selanjutnya Pancasila dapat disebut *moral bangsa Indonesia* dalam arti bahwa Pancasila meliputi apa yang disebut dalam bahasa Inggris *public morality*.¹ Kenyataannya Pancasila adalah suatu *keseluruhan unsur-unsur bersama berbagai moral yang terdapat di Indonesia*. Sebagaimana diketahui di tanah air kita terdapat berbagai moral sesuai dengan adanya berbagai agama dan kepercayaan. Kita jumpai moral Islam, moral Katolik, moral Kristen Protestan, moral Hindu Bali, moral Kong Hu Cu, dan moral aliran-aliran kepercayaan. Masing-masing moral itu mempunyai coraknya sendiri, berbeda satu sama lain dan bersifat relatif dalam arti hanya berlaku bagi golongan atau umat yang bersangkutan. Misalnya moral Islam hanya berlaku bagi umat Islam, moral Kristen hanya bagi umat Kristen, moral Hindu Bali hanya bagi umat Hindu Bali dan seterusnya.

Namun dalam moral-moral itu terdapat pula *unsur-unsur bersama*. Pancasila adalah moral yang terdapat dalam berbagai moral itu sebagai unsur ber-

¹Lihat Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals* (London, 1973), antara lain hal. 7-8; dan Basil Mitchell, *Law, Morality, and Religion in a Secular Society* (London, 1970), khususnya hal. 40-51.

sama, yang oleh sebab itu dapat diterima oleh semua golongan, oleh seluruh rakyat Indonesia, dan menjadi pemersatu. Untuk membedakannya dengan moral-moral itu, moral bersama itu dengan tepat disebut *moral Pancasila*. Moral ini terdapat dalam moral-moral yang hidup di Indonesia, tetapi tidak identik dengan moral-moral itu karena selain moral Pancasila, moral-moral itu memuat asas-asas moral lain, misalnya asas-asas yang mengatur kehidupan seks.

Dengan demikian maka moral Pancasila itu *mengatasi semua golongan dan benar-benar bersifat nasional*. Juga menjadi jelas bahwa moral Pancasila bukan seluruh moral, bukan moral yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa asas-asas Pancasila itu adalah *asas-asas moral yang relevan sebagai dasar negara*. Pancasila adalah moral bangsa yang relevan bagi negara. Dari moral-moral yang hidup di Indonesia kelima sila Pancasila diambil dan ditetapkan sebagai dasar negara karena dua alasan pokok, pertama karena bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan kedua karena relevan untuk dijadikan dasar negara. Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa Pancasila adalah lima asas moral yang ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Namun moral Pancasila itu bukan semata-mata moral bangsa Indonesia, melainkan moral yang mengikat seluruh umat manusia dan oleh sebab itu dapat disebut *moral universal*. Sila-sila itu berakar pada kodrat manusia dan oleh sebab itu inheren dalam eksistensi manusia sebagai manusia. Dengan mempelajari kodrat manusia kita dapat menemukan kelima sila itu sebagai pedoman untuk bertindak. Sesuai dengan dalil, bahwa segala sesuatu harus bertindak selaras dengan kodratnya masing-masing, maka manusia wajib bertindak secara rasional, mengikuti perintah akal budinya, mematuhi asas-asas yang dikenal akal budinya sebagai pedoman bagi tindakan-tindakannya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenal kodratnya dan norma-norma yang harus ditaatinya untuk mencapai tujuan eksistensinya sebagai manusia, yaitu kesempurnaan dan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin. Norma-norma moral itu dijabarkan dari kodrat manusia dan oleh sebab itu dengan tepat disebut *moral kodrati* (natural morals). Orang yang mematuhiya disebut baik dari segi moral (morally good) atau baik sebagai manusia atau juga manusia susila.

Dengan demikian moral kodrati merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia yang inheren dalam kodratnya dan dapat dikenal dengan akal budinya lewat suatu pemikiran yang saksama dan tekun, seperti halnya dengan filsuf-filsuf Yunani, meskipun pada umumnya orang mengenalnya lewat agama atau tradisi bangsa atau golongannya. Moral kodrati ini ada bersama-sama dengan kodrat manusia, muncul bersama-sama dengan

manusia, tetapi manusia tidak mengenalnya sekaligus secara lengkap dan tepat. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenalnya, tetapi karena berbagai faktor banyak orang tidak sampai mengenalnya secara lengkap dan tepat. Lagi pula pengetahuan moral umat manusia berkembang sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang dirinya, kebutuhan-kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungannya, tentang alam sekitarnya dengan hukum yang mengaturnya. Sesuai dengan itu generasi yang satu menerima pengetahuan moral generasi sebelumnya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya setelah mengembangkan dan menyempurnakannya lebih lanjut dengan pemikiran dan pengalamannya sendiri maupun dengan mengambil alih unsur-unsur tertentu dari kebudayaan-kebudayaan lain.¹ Sebagai ilustrasi dapat dilihat sejarah perumusan *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB* yang banyak memuat cita-cita moral umat manusia yang hendaknya dituangkan dalam perundangan bangsa-bangsa sebagai norma-norma hukum positif.

Norma-norma moral itulah yang pertama-tama harus menjadi pedoman kehidupan manusia, baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara. Moral memuat cita-cita moral dan cita-cita hukum yang harus membimbing manusia dalam membuat undang-undang positif, yang pada gilirannya merupakan sarana pokok di tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.²

Moral Pancasila adalah moral kodrati sejauh dikenal dan sampai batas-batas tertentu dilaksanakan bangsa Indonesia (dan bangsa-bangsa lain karena bersifat universal). Pancasila berakar pada kodrat manusia dan semua orang di manapun adalah sama sebagai manusia. Dalam Memorandum DPRGR tanggal 9 Juni 1966, yang disahkan MPRS dengan ketetapanannya No. XX/MPRS/1966 secara tepat dikatakan bahwa Pancasila tak lain adalah "pengejawantahan budi nurani manusia".³

Namun dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kelima sila Pancasila itu belum mengatur seluruh kehidupan manusia, belum seluruh moral dan juga belum seluruh moral yang hidup di Indonesia. Dalam Pancasila disatukan asas-asas moral yang bersifat umum dan relevan bagi hidup kenegaraan. Selain itu kekuasaan negara atas bidang kehidupan yang diatur kelima sila itu tidak penuh, dalam arti bahwa bidang kehidupan manusia itu adalah lebih

¹Lebih lanjut lihat A.P. d'Entreves, *Natural Law* (London, 1972), khususnya hal. 22-35; dan H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (London, 1972), hal. 181-207.

²Lihat J.V. Dolan, "Natural Law and Legislation," *Laval Quarterly for Theology and Philosophy*, 16 (1960), hal. 237-264.

³Lihat *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS disertai UUD 1945* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1969), hal. 47.

luas daripada kekuasaan negara. Makin tinggi nilai manusiawi makin lepas dia dari kekuasaan negara.¹

Pancasila sebagai Moral | Perorangan

Pancasila pertama-tama adalah moral yang berlaku bagi orang Indonesia masing-masing dan oleh sebab itu dapat disebut sebagai *moral perorangan* atau *moral individual*. Dalam kedudukannya ini - sebagai moral perorangan - dia mengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Esa), dengan sesama manusia (Kemanusiaan yang adil dan beradab), dengan tanah air - nusa - bangsa Indonesia (Kebangsaan atau nasionalisme), dengan kekuasaan dan pemerintahan negara (Kerakyatan) dan dengan negara sebagai kesatuan sosial dalam rangka realisasi kesejahteraan umum (Keadilan sosial). Dari sila-sila masing-masing itu mengalir sejumlah kewajiban lain seperti akan kita lihat di bawah. Semuanya itu bukanlah semata-mata kewajiban hukum, tetapi pertama-tama kewajiban moral. Orang yang mengamalkannya dapat disebut baik dari segi moral, sedangkan pelanggar-pelanggarnya buruk atau jahat. Sila-sila itu telah berlaku sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah negara, tetapi berdasarkan penetapannya itu juga menjadi kewajiban hukum, sehingga pelanggar-pelanggarnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum sejauh sila-sila itu telah dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan.

Pancasila sebagai Moral Negara

Penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral Pancasila juga menjadi moral negara. Sebagai konsekuensinya *negara tunduk kepada moral*, tidak boleh melanggarnya, wajib mengamalkannya dan memajukan pengamalannya oleh rakyat. Moral menjadi norma tindakan-tindakan negara dan sehubungan dengan itu *dituangkan dalam undang-undangan*. Dengan perkataan lain, moral Pancasila menjadi pembimbing dalam membuat undang-undang yang mengatur kehidupan negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugas mereka masing-masing, hak-hak dan kedudukan warga negara, hubungan antara warga negara dan negara dan sebaliknya. Akan tetapi hal ini tidaklah berarti, bahwa seluruh moral harus dituangkan dalam undang-undang. Tidak semua norma moral harus ataupun dapat dijadikan norma yuridis, antara lain karena Pancasila mencakup sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pada intinya mewajibkan negara untuk menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia, termasuk

¹Lihat N. Drijarkara, "Pancasila dan Religi," *Kumpulan Karangan* (Yogyakarta), hal. 158-160.

kebebasan-kebebasannya. Norma moral dapat ditetapkan menjadi norma hukum positif sejauh norma itu mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut orang lain, sedangkan soal-soal batin adalah di luar kompetensi dan jangkauan negara serta hukumnya.¹ Dalam hubungan ini dapat dikatakan, bahwa dalam bidang kehidupan batin hanya berlaku norma-norma moral, sedangkan dalam bidang kehidupan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain dapat dan harus berlaku pula norma-norma hukum sebagai pelaksanaan dan pengukuhan norma-norma moral tersebut. Larangan membunuh orang tak bersalah misalnya, adalah pertama-tama suatu norma moral, tetapi karena menyangkut tindakan lahiriah yang melanggar hak asasi orang lain atas hidup, dapat dan wajib ditetapkan menjadi larangan yuridis dan dikukuhkan dengan sanksi-sanksi hukum.

Demikian pula halnya dengan sila-sila Pancasila. Negara wajib mengamankan dan melaksanakannya, tetapi tidak dapat menetapkan semua kewajiban moral yang mengalir dari sila-sila itu menjadi kewajiban yuridis. Dalam hal ini kekuasaan negara terbatas pada kewajiban-kewajiban moral yang mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain.² Misalnya negara dapat menghukum orang yang memeras atau menindas orang lain, tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman atas seorang yang ingin memeras orang lain tetapi karena berbagai faktor tidak jadi melakukannya, atau atas seorang yang tidak bersembahyang, sekalipun sembahyang adalah suatu kewajiban yang mengalir dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi negara juga *berkepentingan dengan pelaksanaan Pancasila sebagai moral perorangan*. Makin baik para warga negara mengamalkan Pancasila atas keyakinannya sendiri, makin terjamin pula pelaksanaan Pancasila yang dituangkan dalam perundang-undangannya. Sehubungan dengan itu negara dapat dan sampai batas-batas tertentu juga wajib ikut membina atau memajukan hidup susila rakyat dengan memberikan anjuran serta bimbingan dan menciptakan suasana di mana moral atau budi pekerti luhur dapat dijalankan dengan mudah.³ Oleh sebab itu dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ditandaskan, bahwa: "Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".⁴

¹Lihat Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (London, 1967), hal. 117-118.

²Lihat MacIver, *The Modern State* (Oxford, 1966), hal. 5, 21.

³Lihat Ernest Barker, *op. cit.*, hal. 119, 123, 132.

⁴Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS disertai UUD 1945* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1969), hal. 265.

Seperti diuraikan di atas, penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral bangsa menjadi moral negara, dan bahwa oleh sebab itu negara wajib mengamankan dan melaksanakannya. Tetapi arti Pancasila sebagai moral bangsa dan Pancasila sebagai moral negara tidak selalu sama. Arti Pancasila sebagai moral bangsa adalah umum, juga memuat artinya sebagai moral negara yang bersifat khusus. Menetapkan Pancasila sebagai moral negara berarti mengkhususkan artinya. Misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai moral bangsa berarti sikap manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diungkapkan dalam sembahyang, ibadah dan ketaatan, sedangkan sebagai moral negara berarti bahwa negara atas dasar pengakuan bahwa bangsa Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa wajib "menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (pasal 29, ayat 2 UUD 1945), membina toleransi berdasarkan sikap saling menghormati dan kerukunan antara sesama umat beragama dan berkepercayaan, dan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹

Moral Pancasila dan Kebudayaan Indonesia

Moral Pancasila adalah *bagian inti kebudayaan nasional Indonesia*. Silanya bukanlah semata-mata salah satu bagian di samping bagian-bagiannya yang lain, tetapi bagian yang menjiwai dan mengarahkan seluruh kegiatan manusia dan negara pada tujuannya. Dengan demikian moral Pancasila adalah juga *dasar atau landasan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia*. Pertama-tama hal itu berarti bahwa moral Pancasila menjadi *pedoman evaluasi dan seleksi* atau penyaringan unsur-unsur kebudayaan yang kita gunakan untuk menyusun dan menyempurnakan kebudayaan kita. Unsur-unsur dalam masyarakat kita yang bertentangan dengannya harus kita buang secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsur yang selaras kita pelihara dan kita kembangkan. Hal itu tidak hanya berlaku bagi kebudayaan-kebudayaan daerah, melainkan juga bagi kebudayaan-kebudayaan lain. Kita tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan-kebudayaan asing yang positif dan dapat memperkaya atau mengembangkan kebudayaan kita serta mempertinggi martabat kemanusiaan bangsa kita, tetapi harus bersedia mengambilalihnya, selama unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kita memerlukan unsur-unsur yang positif itu untuk pembaruan dalam proses pembangunan nasional kita. "Pembaruan tidak lain adalah usaha dari bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri,

¹Lihat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1978), hal. 111.

dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern," demikian Presiden Soeharto dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1974.

Kedua, moral Pancasila menjadi *pedoman pengarah pengembangan kebudayaan kita* agar kebudayaan nasional Indonesia benar-benar dapat memainkan peranannya yang sangat penting untuk memberi arah dan membimbing seluruh pembangunan bangsa kita. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa kebudayaan bukanlah semata-mata satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping bidang-bidang lainnya seperti politik dan ekonomi, melainkan seluruh kehidupan kita sebagai bangsa yang mencakup bidang-bidang itu. Dengan demikian kebudayaan adalah *panglima pembangunan nasional kita*. Agar berhasil pembangunan nasional ini harus diberi dimensi budaya. Dan hal itu terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila secara baik dalam bidang-bidang tersebut. Semuanya itu akan berarti *humanisasi masyarakat* atau realisasi *masyarakat manusiawi* (humane society), sasaran pokok seluruh pembangunan nasional. Itulah pada hakikatnya masyarakat Pancasila. Berkat adanya masyarakat serupa itu, setiap warga masyarakat kita akan dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan selengkap mungkin. Moral Pancasila menempatkan manusia Indonesia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional.

ARTI MATERIAL MORAL PANCASILA

Setelah membicarakan arti Pancasila sebagai moral bangsa Indonesia atau arti formalnya, kita perlu membahas *arti materialnya*. Yang dimaksud ialah materi atau arti sila masing-masing, baik sebagai moral perorangan maupun moral negara. Secara berturut-turut akan dibicarakan kewajiban-kewajiban moral yang mengalir dari sila masing-masing bagi perorangan dan bagi negara.

Pancasila sebagai Moral Perorangan

Sebagai moral perorangan, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi kita masing-masing seperti berikut.¹

¹Lihat Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1978), hal. 54-57.

Ketuhanan Yang Maha Esa

- Mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta dan tujuan kita baik dalam hati dan kata-kata (sembahyang) maupun dalam tingkah laku susila sehari-hari;
- Menghormati kemerdekaan beragama dan beribadah orang dan umat lain sesuai dengan agama atau kepercayaannya (toleransi positif);
- Menghormati agama lain dan pemeluk agama lain;
- Membina kerukunan agama;
- Melaksanakan sila-sila lain dan menjalankan tugas sehari-hari sebagai bakti terhadap Tuhan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Mengakui dan memperlakukan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, kelamin, agama dan kedudukan, sebagai manusia, yang dikurniai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi (atau menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi sesama manusia);
- Memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri (tepa selira);
- Tidak sewenang-wenang, menindas, memeras dan merampas hak-hak sesama manusia;
- Menolak perbudakan, kolonialisme, rasialisme, politik apartheid, kediktatoran dan segala macam diskriminasi;
- Menghormati bangsa-bangsa lain dan hak-hak mereka;
- Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional.

Persatuan Indonesia

- Membina kesadaran dan kebanggaan nasional Indonesia;
- Menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia;
- Ikut membela kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan Indonesia;
- Ikut memajukan persatuan bangsa dan proses integrasi;
- Solider terhadap sesama warga negara;
- Menjunjung tinggi dan ikut mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, termasuk bahasanya;
- Menghormati hak-hak daerah dan kelompok-kelompok yang sah sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika;

- Menolak segala bentuk diskriminasi dan penyakit-penyakit sosial seperti korupsi, pemerasan dan sebagainya yang dapat membahayakan persatuan bangsa;
- Melawan gerakan-gerakan yang membahayakan negara.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

- Menyadari diri sebagai warga negara dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya memajukan kesejahteraan umum;
- Menerima orang lain sebagai sesama warga negara dengan persamaan hak dan kewajiban;
- Menghormati keyakinan dan pendapat sesama biarpun tidak menyetujuinya;
- Ikut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan semua sesama warga negara atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab atas kesejahteraan bersama;
- Ikut dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk MPR, DPR dan DPRD;
- Lewat MPR ikut menentukan GBHN;
- Lewat DPR ikut mengawasi pelaksanaan GBHN, menetapkan anggaran negara dan mengawasi pemerintah;
- Mematuhi hukum sebagai keputusan bersama, termasuk Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan Undang-undang.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum itu;
- Mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang khusus ditetapkan untuk kesejahteraan umum;
- Membayar pajak secara jujur;
- Dalam menggunakan hak milik pribadi memperhatikan fungsi sosial;
- Ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam perekonomian dan mendapatkan bagian yang wajar dari kekayaan dan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga masing-masing;

- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesejahteraan umum seperti menentukan harga-harga semau gue, menekan gaji dan upah semau-maunya, korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar dan lain sebagainya yang hanya menguntungkan sedikit orang tetapi merugikan secara tak adil rakyat banyak.¹

Pancasila sebagai Moral Negara

Sebagai moral negara, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi Indonesia seperti berikut.

Ketuhanan Yang Maha Esa

- "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (UUD 1945, Pasal 29 ayat 2);
- Membantu hidup keagamaan rakyat dengan menciptakan suasana yang baik baginya dan melarang propaganda anti agama;
- Mengarahkan pendidikan agama pada hidup keagamaan yang dewasa;
- Membina toleransi positif antar umat beragama/berkepercayaan;
- Memajukan kerukunan antar umat beragama/berkepercayaan;
- Menghormati semua agama dan kepercayaan dan memperlakukannya secara sama, lagi pula menghormati otonomi masing-masing dan tidak mencampuri urusan intern agama/kepercayaan;
- Menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Memberantas gejala-gejala hidup keagamaan yang kurang sehat seperti fanatisme, takhyul, magi dan usaha mengadu domba antar agama.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang sebagai manusia, subyek martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi;
- Memungkinkan semua warganya menikmati hak-hak asasinya secara aman, menunaikan kewajiban-kewajiban asasinya dengan baik, mengembangkan dirinya sebaik mungkin, dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sempurna mungkin;

¹Lihat Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1974), hal. 150-156.

- Menjamin agar semua orang diperlakukan secara adil dan beradab dengan menetapkan undang-undang yang tepat dan melaksanakannya dengan baik (the rule of law);
- Memperlakukan semua bangsa dan negara sebagai sesama warga umat manusia, dan bersama-sama membangun dunia baru yang lebih baik;
- Mencegah dan menindak tindakan-tindakan yang melanggar martabat dan hak-hak asasi manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, mutilasi, perbudakan, penindasan, kesewenang-wenangan, pemerasan, kekerasan, perlakuan feodal dan sebagainya;
- Ikut mengakhiri kolonialisme dan imperialisme;
- Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional.

Persatuan Indonesia

- Membela dan mengembangkan Indonesia sebagai satu negara nasional yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
- Meneruskan karya nation-building dengan meningkatkan persatuan, integrasi, asimilasi, kerukunan, dan kerja sama, tanpa menghapus perbedaan-perbedaan dan ciri-ciri daerah dan kelompok yang sah;
- Menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika;
- Menolak sukuisme, daerahisme dan separatisme dan segala pertentangan antar suku dan antar daerah;
- Menjunjung tinggi dan mengembangkan kebudayaan serta kepribadian nasional Indonesia;
- Memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional;
- Menolak baik isolasionisme maupun kolonialisme, imperialisme, ekspansionisme dan kosmopolitisme yang tidak menghargai nilai-nilai nasional;
- Menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan negara-negara lain atas dasar kemerdekaan, persamaan, manfaat bersama dan sikap saling menghormati, demi terwujudnya dunia baru yang lebih baik.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- Mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya itu dengan memilih wakil-wakilnya untuk MPR, DPR dan DPRD secara bebas dan rahasia;
- Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pelaksanaan tugas-tugas nasional, khususnya dengan menjamin agar rakyat lewat MPR ikut menentukan

GBHN dan lewat DPR ikut melaksanakannya dalam undang-undang serta ikut mengawasi pelaksanaannya oleh pemerintah dan aparaturnya;

- Mendengarkan suara rakyat dan memperhatikannya;
- Melayani kepentingan-kepentingan rakyat dan membina pegawai negeri sebagai pelayan rakyat (public servants);
- Berfungsi sebagai negara hukum (mengakui kedaulatan hukum);
- Menegakkan hukum sebagai ungkapan kehendak rakyat, termasuk Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Undang-Undang;
- Mengusahakan agar lembaga-lembaga negara berfungsi dengan baik dan menjalin hubungan fungsional satu sama lain;
- Menjamin "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya" (UUD 1945 pasal 28).

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat;
- Membagi beban dan manfaat, khususnya kekayaan dan pendapatan negara, kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu mereka yang lemah guna menjamin adanya keadilan;
- Mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, dan dalam pembangunan (penyebaran pembangunan);
- Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (UUD 1945 pasal 33 ayat 1);
- Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (UUD 1945 pasal 33 ayat 2);
- Menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945 pasal 33 ayat 3);
- Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (UUD 1945 pasal 34);
- Melaksanakan sistem pajak progresif;
- Mengurangi jurang kaya miskin;
- Mengakui hak milik perorangan sambil menandakan fungsi sosial pemakaiannya;
- Mengatur konsumsi sesuai dengan kemampuan ekonomi nasional dan mengatur iklan-iklan;

- Mengusahakan produksi bahan-bahan pokok secara melimpah;
- Menjamin pembangunan perumahan rakyat yang murah dan sehat dalam jumlah yang mencukupi;
- Mengusahakan agar tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran;
- Meningkatkan penghasilan kelompok-kelompok yang sangat rendah pendapatannya;
- Dengan prioritas utama memperluas kesempatan kerja sehingga setiap orang yang mampu dapat bekerja secara produktif penuh, sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan dan kecakapan masing-masing;
- Menciptakan suatu sistem penggajian yang seimbang baik secara horisontal antara sektor-sektor maupun secara vertikal untuk mencegah perbedaan-perbedaan yang menyolok;
- Menciptakan suatu sistem harga barang-barang dan jasa-jasa yang seimbang untuk memungkinkan semua warga negara, khususnya yang lemah kedudukannya, hidup secara layak, dan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil dan perbedaan-perbedaan yang menyolok (menghapus sistem liberal yang berlaku selama ini);
- Mengusahakan adanya keseimbangan antara penghasilan dan biaya hidup;
- Mengusahakan jaminan-jaminan sosial bagi seluruh rakyat dengan mendirikan atau memajukan asuransi-asuransi dan dana-dana;
- Menggalakkan penyebaran saham-saham perusahaan-perusahaan yang bonafide di kalangan rakyat banyak, tidak hanya untuk mengumpulkan dana pembangunan tetapi juga untuk mendorong rakyat agar menabung dan mengadakan jaminan-jaminan;
- Memajukan gerakan koperasi sebagai alat untuk membangun ekonomi rakyat yang lemah dan meratakan kemakmuran;
- Pendek kata, keadilan sosial mewajibkan negara untuk menyusun suatu masyarakat di mana semua golongan dan lapisan masyarakat secara aktif ikut dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan secara demikian ikut menikmati kemakmuran.

Secara demikian sila pertama mengatur kewajiban negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua kewajiban negara terhadap semua orang dan semua negara lain, sila ketiga kewajiban negara terhadap Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sila keempat kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang politik dan pemerintahan, dan sila kelima kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi juga di sini harus diperhatikan bahwa kelima sila itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisah-

kan satu sama lain karena merupakan *suatu kesatuan yang bulat* seperti di-tandaskan oleh Presiden Soeharto: "Pancasila merupakan lima dasar yang merupakan satu totalitas, yang merupakan satu kebulatan yang tunggal, yang tiap-tiap sila selalu harus mengandung keempat sila yang lain. Tiap-tiap sila tidak boleh dilepaskan dari sila yang lain; tiap-tiap sila tidak boleh dipertentangkan terhadap sila yang lain, lebih-lebih karena di antara sila-sila itu memang tidak ada hal-hal yang bertentangan."¹

Penerapan Moral Pancasila

Uraian di atas barulah suatu usaha untuk merumuskan sila masing-masing dari Pancasila *secara singkat*. Dalam rangka pelaksanaannya baik secara obyektif dalam peraturan-peraturan perundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah maupun secara subyektif dalam sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing, sila-sila itu *perlu dijabarkan lebih lanjut dan diterapkan* dalam berbagai situasi dan bidang kehidupan negara, agar moral Pancasila benar-benar operasional sebagai norma atau pedoman, baik bagi negara, termasuk lembaga-lembaga negara, maupun bagi perorangan. Kita akan berusaha melakukannya dalam karangan-karangan lain yang akan menyusul.

Dalam karangan ini kita membatasi diri dan kiranya cukup menandaskan bahwa sebagai moral negara, Pancasila *mengatur seluruh kehidupan negara* dan harus menjadi jiwa bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan dan keamanan pertahanan. Norma-norma yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan dalam bidang-bidang itu. Peraturan-peraturan perundangan yang mengaturnya tidak hanya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma itu, melainkan juga harus selaras dengan itu dan sebanyak mungkin merupakan penuangan atau pelaksanaan obyektifnya. Dengan perkataan lain, dalam rangka pelaksanaan Pancasila harus disusun dan dijalankan politik Pancasila baik dalam maupun luar negeri, sistem ekonomi Pancasila, sistem pendidikan Pancasila, sistem jaminan-jaminan sosial Pancasila, sistem perburuhan Pancasila, sistem perpajakan Pancasila dan lain sebagainya. Dengan maksud itu harus disusun *sistem hukum nasional atas dasar Pancasila* untuk menggantikan sistem hukum warisan jaman kolonial dan feodal yang tidak hanya banyak ketinggalan jaman tetapi juga bertentangan dengan ideologi negara, yang berlaku sampai sekarang.

Yang lebih penting lagi, sistem hukum nasional serupa itu *harus dilaksanakan dengan baik*. Negara tidak hanya wajib menyusunnya, tetapi terutama

¹Pidato pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967, dalam Krissantono, Ed., *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1976), hal. 26.

juga menjamin pelaksanaannya secara efektif, karena betapa baiknya pun dia tidak berguna kalau tidak dilaksanakan. Tetapi justru di sinilah salah satu masalah pokok kita. Banyak peraturan perundangan tetap tinggal di atas kertas dan tidak dilaksanakan dengan baik. Apa yang terjadi kerap kali bertolak belakang dengan peraturan-peraturan itu. Dan salah satu jaminan pelaksanaan yang penting ialah adanya *pengawasan yang saksama*, akan tetapi di sini terdapat pokok kelemahan kita lain. Mekanisme pengawasan kita, baik yang intern maupun ekstern, kurang berfungsi. Oleh sebab itu sistem "checks and balances" antara lembaga-lembaga negara yang tinggi, seperti diatur dalam UUD 1945, perlu dikembangkan dan disempurnakan pelaksanaannya. Khususnya DPR dan dalam bidang keuangan juga BPK perlu meningkatkan kegiatannya mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan-peraturan perundangan bawahan. Demikianpun inspektorat-inspektorat jenderal dalam departemen-departemen, pemimpin di setiap tingkatan aparatur pemerintah, dan pers kita.

Dalam rangka penghayatan dan pelaksanaan Pancasila *pendidikan moral Pancasila* adalah salah satu sarana yang sangat penting. Negara wajib menyelenggarakan atau memajukannya dalam kerja sama dengan keluarga-keluarga, lembaga-lembaga keagamaan dan kepercayaan, dan organisasi-organisasi lain. GBHN tahun 1978 antara lain memuat ketentuan berikut: "Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta."

Pendidikan moral Pancasila itu dapat diselenggarakan lewat pendidikan *formal* di sekolah-sekolah maupun lewat pendidikan *informal*. Hal itu juga dapat dilakukan *lewat undang-undang*. Sasaran undang-undang bukanlah semata-mata pencegahan kejahatan-kejahatan dan dilakukannya perbuatan-perbuatan baik, tetapi juga pembinaan warga negara menjadi orang baik. Dengan membiasakannya berbuat baik, undang-undang lambat-laun menjadikannya orang baik, sehingga dengan mudah, cepat dan senang melakukan hal-hal yang baik atas keyakinannya sendiri.

PENUTUP

Pada hakikatnya Pancasila adalah budi pekerti atau moral, moral bangsa Indonesia, yang dengan tepat dapat disebut moral Pancasila untuk membeda-

kannya dari moral-moral lain. Moral Pancasila ini adalah bagian penting dari pandangan hidup bangsa Indonesia dan biasanya bahkan disebut sebagai pandangan hidup bangsa begitu saja. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini telah berabad-abad lamanya berakar dan hidup dalam hati sanubari, watak, kepribadian dan pergaulan hidup bangsa Indonesia, lagi pula mengendap dalam adat-istiadat, pranata-pranata dan lembaga-lembaga sosial. Menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan pandangan hidup bangsa ini dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah atau ideologi Negara Indonesia Merdeka, dan secara demikian menjadi *sumber tertib negara* dan *sumber tertib hukumnya* serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya. Dengan demikian Pancasila adalah *maha penting* dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia seperti ditandaskan oleh Presiden Soeharto: "Karena Pancasila merupakan *pandangan hidup* kita, maka Pancasila itu pun menjadi *tuntunan hidup* dan *tujuan hidup* bangsa Indonesia; ia menjadi *sumber tertib sosial*, ia menjadi *sumber tertib seluruh peri-kehidupan kita*, baik sebagai individu, maupun dalam ikatan golongan, ikatan Partai Politik, ikatan organisasi, ia merupakan *sumber tertib negara* dan *tertib hukum* serta harus menjadi *pedoman* dan *dilaksanakan pemerintah*, semua *aparatnya* dan oleh *setiap pejabat* dalam melaksanakan kekuasaan serta tugasnya."¹

Pancasila dan penjabarannya dalam UUD 1945, asal dipahami, dihayati dan diamalkan atau dilaksanakan dalam segala segi kehidupan dalam tata pergaulan bangsa Indonesia secara murni dan konsekuen sesuai dengan perjuangan Orde Baru, merupakan *jaminan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional*, khususnya terwujudnya "suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila" yang pada gilirannya akan memungkinkan setiap warga bangsa dan negara hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin sesempurna mungkin. Pelaksanaan Pancasila dalam hidup kenegaraan berarti, bahwa kepentingan-kepentingan negara dan kepentingan-kepentingan pribadi semua warga negara mendapatkan perhatian yang wajar dalam suatu keseimbangan yang tepat. Sebagai konsekuensinya akan terjamin kepastian hukum dan tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Oleh sebab itu Pancasila harus *dipertahankan* sekuat tenaga dan yang lebih penting lagi *dipahami dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen*. Hal ini merupakan tugas seluruh bangsa, baik pemerintah maupun rakyat, dan harus kita perjuangkan bersama-sama.

¹*Ibid.* Huruf kursif adalah dari penulis.

Pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

BABARI*

I

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara tetapi penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara dan setiap lembaga kenegaraan serta lembaga kemasyarakatan baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.¹ Dasar pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi untuk menuangkan P-4 dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 adalah bahwa: (1) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya sebagai landasan pembangunan nasional demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945; (2) demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati dan mengamalkan Pancasila diperlukan adanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.²

Sebagaimana diketahui, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia karena bersumber pada kodrat manusia. Namun bagi kita bangsa Indonesia nilai-nilai itu diterima sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan diwujudkan dalam perilaku hidup sehari-hari secara serasi, selaras dan seimbang. Hal ini memberikan corak khusus kepada bangsa Indonesia sehingga

*Staf CSIS.

¹Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 pasal I dan 3.

²*Ibid.*

Pancasila bagi kita juga merupakan kepribadian bangsa. Agar dapat diwujudkan secara konkrit dalam perilaku, maka nilai-nilai itu perlu dijabarkan menjadi norma-norma sebagai penuntun dan pegangan hidup. Dalam P-4 nilai-nilai itu dijabarkan menjadi 36 norma yang juga dikenal sebagai 36 butir mutiara Pancasila.

Agar norma-norma Pancasila ini dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia, maka perlu dilakukan pemasyarakatan (sosialisasi), yaitu usaha sadar untuk mengajarkan dan meneruskannya kepada seluruh warga negara Indonesia.

Instansi yang bertugas melaksanakannya telah terbentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1979, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7), suatu lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya adalah melaksanakan pembinaan pendidikan tentang P-4 bagi seluruh lapisan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan. BP-7 juga menyelenggarakan pendidikan calon-calon penatar yang diperlukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan dan melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga pemerintah.¹ Badan ini tersusun secara vertikal sampai dengan daerah tingkat kabupaten. Bagi BP-7 Pusat semua pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibebankan kepada anggaran belanja Sekretariat Negara dan bagi BP-7 Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.²

Hingga saat ini BP-7 Pusat atau Daerah telah melakukan pemasyarakatan P-4 ini melalui penataran-penataran bagi organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, Korpri, ABRI dan pengusaha. Sedangkan untuk pegawai Republik Indonesia pedoman pelaksanaan penataran diatur secara tersendiri, yaitu melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1978 tentang Penataran Pegawai Republik Indonesia mengenai hasil-hasil Sidang Umum MPR tahun 1978. Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam instruksi ini adalah: (1) pegawai negeri sipil; (2) pegawai bank milik negara; (3) pegawai perusahaan milik negara yang meliputi Pertamina, Perum, Persero dan perusahaan negara yang belum digolongkan; (4) pegawai perusahaan daerah; (5) pejabat-pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan di desa. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang UUD 1945, P-4

¹Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

²*Ibid.*, Bab VII, Pasal 19.

dan GBHN kepada segenap Pegawai Republik Indonesia, dengan maksud agar mereka dapat menghayati dan mengamalkannya dengan lebih baik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta mampu menyebarluaskannya di lingkungannya masing-masing.

Pemasyarakatan P-4 ini akan lebih ditingkatkan lagi pelaksanaannya dalam Pelita IV. GBHN 1983 telah menetapkan bahwa dalam rangka meman-tapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memasyarakatkan P-4 melalui pendidikan, penataran dan usaha-usaha lainnya di seluruh lapisan masyarakat.¹ Berlandaskan pada ketetapan GBHN ini Presiden Mandataris MPR telah menuangkan lebih lanjut dalam Panca Krida Kabinet Pembanguan IV butir ketiga, yaitu meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P-4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.²

II

Tujuan pemasyarakatan P-4 adalah agar norma-norma Pancasila yang menjadi penuntun dan pedoman peri laku para penyelenggara negara serta setiap warga negara Indonesia dapat dimengerti, dihayati dan kemudian di-amalkan dalam kehidupan kemasyarakatan dan pembangunan nasional. Dengan demikian Pancasila akan menjadi moral pembangunan sehingga pem-bangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila. Semua sikap/peri laku para penyelenggara negara dan semua warga negara Indonesia harus berlan-daskan pada 36 butir mutiara Pancasila yang terdapat dalam P-4. Sikap diar-tikan sebagai kesiagaan mental yang terbentuk melalui pengalaman yang memberi pengarahan atau pengaruh tentang bagaimana seseorang menang-gapi semua obyek atau situasi yang dihadapinya. Ini berarti bahwa norma-norma Pancasila akan menjadi sumber motivasi bagi setiap warga negara In-donesia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya.

Usaha untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan secara terencana, ter-arah dan sistematis. Jalur-jalur yang dapat dipergunakan dalam proses pemasyarakatan P-4 ini adalah: (1) keluarga; (2) sekolah; (3) lingkungan; (4) media massa; (5) organisasi sosial politik; (6) organisasi profesi dan fung-sional serta kemasyarakatan lainnya. Semua sarana/jalur ini turut menentu-

¹Lihat *Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN*.

²Lihat *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1983*.

kan proses pemasyarakatan diri (sosialisasi) individu di dalam lingkungan masyarakatnya.

Keluarga merupakan tempat pembentukan watak dan sikap yang pertama dan utama bagi setiap individu. Orang tua adalah guru pertama yang memperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku umum dalam masyarakat adalah nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Orang tua wajib memberikan teladan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan nilai dan norma-norma Pancasila. Sikap dan perbuatan semacam itu antara lain ialah saling menghormati, mempercayai dan mencintai, bekerja sama, mendahulukan kepentingan bersama, berdoa/beribadah bersama, menyenangkan lingkungan rumah yang bersih dan teratur, menyayangi sesama makhluk hidup seperti binatang peliharaan dan tumbuh-tumbuhan. Apabila dihayati dan dilakukan sejak dari lingkungan pergaulan dalam keluarga, maka dalam pergaulan di luar lingkungan keluarga semuanya itu kemungkinan akan dilaksanakan juga.

Sekolah sebagai wadah pembentuk watak dan sikap melalui proses mengajar-belajar guru-murid juga merupakan sarana pemasyarakatan P-4. Kurikulum sekolah negeri dan swasta dari tingkat TK (Taman Kanak-kanak) hingga perguruan tinggi harus memuat mata pelajaran yang mampu meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau mata kuliah Pancasila/ideologi negara di tingkat perguruan tinggi. Sudah barang tentu penyajian mata pelajaran itu harus seimbang dengan mata pelajaran/kuliah lainnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mampu menggunakan sains dan teknologi baru dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya.

Akan tetapi para guru di sekolah atau dosen di perguruan tinggi harus menyadari bahwa pemasyarakatan P-4 di lingkungan sekolah/perguruan tinggi dilakukan melalui semua mata pelajaran/mata kuliah dalam kurikulum pendidikan dan bukan hanya melalui mata pelajaran PMP atau mata kuliah Pancasila/ideologi negara semata. Karena itu semua dosen dan guru harus mempunyai rasa tanggung jawab atas pemasyarakatan P-4 itu. Rasa tanggung jawab ini terpancar dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, sehingga patut ditiru oleh murid, mahasiswa atau anggota masyarakat lainnya baik di lingkungan sekolah atau kampus maupun dalam lingkungan masyarakat luas. Dalam proses pembentukan watak dan sikap yang sesuai dengan norma-

norma Pancasila dalam diri anak didik/mahasiswa para guru dan dosen harus mampu menggunakan metode mengajar yang tepat dan bukan hanya memakai metode ceramah. Para guru/dosen wajib mempersiapkan bahan pelajaran/kuliah sebaik-baiknya terutama materi-materi yang mempunyai kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat secara konkrit

Lingkungan juga berperan sebagai wadah pembentuk watak dan sikap manusia. Sebagaimana diketahui, manusia pada hakikatnya merupakan hasil kreasi dua kekuatan, yaitu: (1) warisan genetik orang tua yang tertanam dalam genes dan khromosom; (2) lingkungan tempat kita dibesarkan (keluarga), dididik (sekolah) dan mengalami perkembangan selanjutnya (masyarakat luas). Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sudah diuraikan, sehingga yang akan diuraikan lebih lanjut hanyalah lingkungan masyarakat luas tempat setiap individu mengalami perkembangan lebih lanjut melalui interaksi sosial antar individu, antara individu dan kelompok atau antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara per-orangan dan kelompok manusia.¹

Kelompok-kelompok sebagai wadah interaksi sosial yang bersifat pembinaan dan pengembangan kepribadian antara lain adalah: (1) pramuka; (2) Karang Taruna; (3) Palang Merah Remaja; (4) program kerja putus sekolah melalui Balai Latihan Ketrampilan (BLK) atau kursus-kursus lainnya; (5) program pendidikan orang dewasa melalui PKK, LKMD, pemberantasan 3 buta secara fungsional dan penyuluhan-penyuluhan lainnya yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah. Semua wadah ini dapat menjadi sarana pemasyarakatan nilai dan norma Pancasila bagi anggota masyarakat umumnya. Mengingat latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, maka materi P-4 perlu disusun secara sederhana dan disajikan dengan cara yang sesuai sehingga mudah diterima.

Media massa juga merupakan sarana yang ampuh dalam menyebarluaskan nilai dan norma-norma perilaku yang tercantum dalam P-4, dan harus digunakan seoptimal mungkin. Media massa tradisional seperti wayang ataupun kesenian rakyat lainnya dan media massa modern seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dapat menjadi media pembawa pesan tentang nilai dan norma-norma Pancasila. Televisi sebagai media auditif dan visual sekaligus merupakan sarana pemasyarakatan yang sangat intensif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program Gema Pancasila perlu dilaksanakan secara sistematis dan tematis. Artinya tema-tema yang akan menjadi program

¹Soerjono Sockanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 55.

siaran diambil secara berurutan dari ke-36 butir norma Pancasila. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk kesenian, permainan ataupun kegiatan nyata lainnya. Kehadiran pewawancara dan manggala dalam acara ini hanya sebagai pengambil kesimpulan dan semua itu dikemukakan dalam bahasa Indonesia yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh semua pemirsa. Dewasa ini dialog di antara pewawancara dan manggala dalam acara tersebut membosankan dan kadang kala tidak memperjelas masalah.

Organisasi sosial politik seperti Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan juga melakukan fungsinya sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi norma-norma Pancasila agar sikap dan perilaku para anggotanya sesuai dengan nilai dasar (asas)-nya.¹ Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa MPR dalam GBHN 1983 menetapkan bahwa Partai-partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.² Dengan demikian organisasi kekuatan sosial politik mampu melaksanakan salah satu fungsinya seperti yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yaitu membina anggota-anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila serta setia pada UUD 1945 dan menjadi salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat; dan melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945.³ Dengan melaksanakan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka organisasi kekuatan sosial politik ikut aktif dalam proses pemasyarakatan P-4.

Organisasi Kemasyarakatan yang mengelompokkan anggota masyarakat berdasarkan profesi, fungsi atau minat dan agama juga menjadi sarana dalam proses memasyarakatkan P-4 dan partner pemerintah dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Karena itu organisasi kemasyarakatan adalah wadah pembina anggota-anggotanya menjadi orang-orang yang tangguh dan dinamis dalam mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara serta setia pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu organisasi kemasyarakatan mempunyai kewajiban menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945. Apabila demikian halnya, maka semua organisasi kemasyarakatan harus menjadikan Pancasila satu-satunya asas dalam organisasinya. Secara demikian setiap organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam proses pemasyarakatan P-4, UUD 1945 dan GBHN.

¹Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1977), hal. 163.

²Lihat *Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara*.

³Lihat *UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya*.

III

Setelah kita membahas sarana-sarana pemasyarakatan P-4, kita harus menjawab beberapa pertanyaan lagi, yaitu: (1) siapa yang melaksanakannya; (2) apa yang telah dikerjakan sejauh ini; (3) bagaimana caranya. Pertanyaan yang pertama dapat dijawab secara singkat: semua warga negara dan masyarakat Indonesia karena Pancasila yang telah dijabarkan dalam P-4 merupakan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara Republik Indonesia. Karena itu setiap warga negara Indonesia wajib mengekspresikan semua nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila itu dalam peri laku dan sikap hidupnya sehari-hari dalam masyarakat. Akan tetapi karena tingkat pengertian, pemahaman dan penghayatan nilai dan norma Pancasila seperti tercantum dalam P-4 oleh kebanyakan warga negara dan kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan orientasi politik, profesi, fungsi dan minat tertentu masih rendah, maka dewasa ini dilakukan penataran-penataran oleh BP-7 Pusat dan BP-7 Daerah Tingkat I/II.

Penataran ini tidak merupakan indoktrinasi melainkan usaha untuk memahami kembali, meresapi, menghayati dan mengamalkan gagasan-gagasan kita mengenai masyarakat yang kita cita-citakan.¹ Karena itu suasana dalam setiap penataran bukanlah suasana monolog tetapi dialog. Para manggala sebagai pembimbing, pengarah dan penyaji materi selalu terlibat dalam dialog dan diskusi dengan para petatar. Para manggala sebagai penyaji materi dan moderator dalam diskusi kelompok, kelas dan paripurna selalu mengatakan bahwa mereka bukanlah orang yang paling pandai/mengetahui tentang materi P-4, UUD 1945 ataupun GBHN. Para petatar diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya baik secara lisan dalam diskusi-diskusi maupun secara tertulis dalam makalah sub-kelompok, kelompok ataupun pidato. Dengan cara ini diharapkan agar se usai penataran setiap petatar mengenal, mengerti dan menghayati norma-norma hidup berdasarkan Pancasila untuk selanjutnya mengamalkannya dalam sikap dan peri laku hidup sehari-hari dalam masyarakat. Dengan demikian norma-norma hidup yang berdasarkan Pancasila ini akan terasa terpancar dari dalam dirinya dan merupakan bagian dan sekaligus tujuan hidupnya.

Materi yang disajikan selama penataran adalah P-4, UUD 1945 dan GBHN. Ketiga materi itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila merupakan sumber gagasan kita mengenai wujud masyarakat yang mampu memberikan kesejahteraan lahir dan batin kepada kita semua. Pancasila menjiwai UUD 1945. Karena itu UUD 1945 tidak akan kita

¹Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Hahnan Negara* (Jakarta: 1981).

pahami atau mungkin kita laksanakan secara keliru, jika kita tidak memahami Pancasila. Selanjutnya apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan ditunjukkan oleh UUD 1945 tercermin dalam GBHN yang merupakan strategi pembangunan kita dalam setiap tahap.¹ Presiden sebagai mandataris MPR menuangkannya dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) melalui Surat Keputusan Presiden dan kemudian menjabarkannya lebih lanjut dalam program-program APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama DPR setiap tahunnya.

Selain penyajian materi-materi itu dalam bentuk ceramah dan tanya jawab juga dilakukan diskusi-diskusi yang intensif dalam kelompok (sekitar 15-17 orang), kelas dan sidang paripurna. Dalam diskusi kelompok setiap petatar diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan tema yang tengah didiskusikan. Di samping diskusi juga dilakukan pendalaman materi sebanyak 2 kali. Pendalaman pertama dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui apakah para petatar telah mengenal dan mengetahui ruang lingkup materi (P-4, UUD 1945, GBHN) yang telah diceramahkan hari-hari sebelumnya untuk kemudian dibahas dalam diskusi kelompok dan kelas. Pendalaman pertama ini dapat disamakan dengan pre-test dalam lingkungan pendidikan formal. Adapun pendalaman kedua (post-test) dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah petatar yang akan menjadi calon penatar ini benar-benar sudah mengerti dan memahami ruang lingkup materi-materi itu.

Pola penataran sekarang ini dibagi menjadi 2, yaitu pola penataran untuk calon penatar dan pola penataran pendukung. Pola penataran untuk calon penatar biasanya dilakukan oleh BP-7 Pusat dan berlangsung selama 120 jam atau 14 hari kerja. Sebaliknya penataran pendukung dapat berlangsung selama 45 jam, 25 jam atau 17 jam. Pola ini diberikan kepada mereka yang karena kedudukan/jabatannya di instansi pemerintah wajib mengerti, menghayati dan mengamalkan Pancasila tetapi tidak dapat meninggalkan tempat kerjanya terlalu lama. Materi yang disajikan dalam kedua pola itu sama, yaitu P-4, UUD 1945 dan GBHN. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah waktu diskusi. Selanjutnya pola penataran pendukung selama 100 jam tengah diujicobakan di lingkungan mahasiswa.

Prioritas pertama penataran ini diberikan kepada pegawai Republik Indonesia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1978 tentang Penataran Pegawai Republik Indonesia mengenai hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tahun 1978 maka penataran ini dilakukan secara bertingkat, yaitu: (1) penataran tingkat nasional; (2) penataran tingkat instansi pusat; (3) penataran tingkat propinsi; (4) penataran tingkat kabupaten/kotamadya; (5) penataran tingkat kecamatan.

Maksudnya adalah agar pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dapat menghayati dan mengamalkannya dalam lingkungan kerjanya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Prioritas kedua diberikan kepada organisasi kekuatan sosial politik, ABRI, para pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan dan para mahasiswa. Bagi masyarakat luas terutama mereka yang berdomisili di tingkat RT, RW dan Kelurahan di kota dan di desa penataran P-4 ini dilakukan melalui permainan Simulasi P-4 atau melalui kesenian rakyat lainnya. Kesenian rakyat setempat dapat juga digunakan sebagai media penyampaian pesan tentang norma-norma peri laku/sikap yang terdapat dalam Pancasila. Dengan cara ini diharapkan agar penataran P-4 ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga pada saatnya nanti sikap dan peri laku setiap manusia Indonesia merupakan pancaran dari nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila.

Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik penyajian materi penataran adalah tingkat pendidikan formal para petatar. Mengingat bahwa tingkat pendidikan formal petatar dewasa ini masih sangat bervariasi maka dalam menguraikan materi-materi ini dipergunakan satu metode yang disebut metode "obyektif-praktis" (bukan "obyektif-teoretis").¹ Maksudnya semua materi yang disajikan oleh para manggala dan pendapat yang dikemukakan oleh para petatar dalam diskusi-diskusi harus bersumber pada Ketetapan No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, UUD 1945, GBHN atau bahan-bahan dokumen resmi yang dapat dipercaya kebenarannya. Praktis maksudnya jelas, mudah dimengerti dan dihayati untuk kemudian diamalkan dalam sikap dan peri laku hidup sehari-hari. Namun selalu perlu disadari bahwa bagaimanapun baiknya suatu sistem pendidikan seperti penataran ini, hasil yang baik seperti diharapkan sangat ditentukan oleh pendidik (manggala) yang cakap dan mampu memberi teladan dalam sikap dan peri laku hidup sehari-hari dan oleh situasi dan kondisi yang menunjang dalam kehidupan kemasyarakatan umumnya.

Dalam kehidupan masyarakat kita yang paternalistis ini teladan para pemimpin formal dan informal turut menunjang proses penataran P-4. Pola hidup boros dan pamer yang ditunjukkan oleh beberapa pemimpin masyarakat kita menyalahi beberapa prinsip tingkah laku hidup berdasarkan sila keadilan sosial dari Pancasila. Apalagi kalau pola hidup semacam itu ditunjukkan oleh para pemimpin yang duduk dalam lembaga birokrasi negara. Untuk itu krida kedua dari Panca Krida Kabinet Pembangunan IV, yaitu

¹Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *ibid.*, hal. 54

meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh mulai saat ini juga. Tekad pemerintah untuk memberantas korupsi, komersialisasi jabatan dan pungutan liar (pungli) harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh aparatur pemerintah dan ABRI sebagai abdi dan sekaligus panutan anggota masyarakat. Membina pola hidup sederhana, selalu mawas diri, jujur dalam arti menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela, berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas merupakan sikap hidup yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu. Secara demikian kehidupan masyarakat yang berdasarkan norma-norma Pancasila akan dapat terwujud dan misi penataran P-4 dapat disebut sukses.

Dari segi ini dapat dipahami mengapa prioritas pertama penataran P-4 ini diberikan kepada pegawai Republik Indonesia, ABRI, pemimpin organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta mahasiswa. Mereka adalah pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan nasional yang terdepan. Dalam diri mereka perlu ditanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila, yaitu "ing ngarso sung tulodo," "ing madyo mangun karso," "tut wuri handayani." Dengan dipegangnya ketiga prinsip kepemimpinan itu oleh para pemimpin formal dan informal dalam masyarakat kita, diharapkan bahwa proses pembangunan nasional kita dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional seperti tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

IV

Sebagai penutup uraian ini perlu ditegaskan bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai penuntun dan pegangan hidup dalam sikap dan perilaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. P-4 dikembangkan dari sumbernya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. P-4 merupakan identitas diri setiap manusia Indonesia yang selalu sadar bahwa kemanusiaannya hanya mempunyai arti apabila ia berada dalam jalinan hubungan yang dinamis dengan manusia lainnya dan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya secara selaras, serasi dan seimbang. Dalam kaitan itulah setiap manusia Indonesia harus mau dan mampu mengendalikan kepentingan dirinya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat bangsa yang baik. Dengan demikian norma-norma dalam P-4 dapat menjadi sumber motivasi bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia.

Oleh karena itu dalam diskusi kelompok, diskusi kelas dan diskusi paripurna maupun pidato selama penataran para petatar tidak hanya dilatih agar mampu berbicara, berani mengemukakan pendapat dan atau menanggapi pendapat orang lain, tetapi juga diberi kesempatan untuk membicarakan masalah-masalah yang dipandang sebagai "crucial point" dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dari segi ini diharapkan pula agar para manggala yang menjadi moderator dalam diskusi-diskusi memiliki sumber referensi yang luas terutama yang berkaitan dengan tema-tema diskusi.

Selain itu dalam rangka lebih memantapkan proses pemasyarakatan P-4 di masa yang akan datang maka bentuk penataran ini bukanlah satu-satunya. Dengan kata lain, penataran ini hanya merupakan satu bentuk pemasyarakatan P-4 untuk jangka tertentu misalnya sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan Repelita IV. Masa sesudah itu pemasyarakatan P-4 perlu dilakukan dalam bentuk lain yang lebih sistematis dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Sarana pemasyarakatan P-4 di masa depan adalah pendidikan, media massa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Tetapi yang terpenting adalah sikap dan perilaku para pemimpin yang patut ditiru oleh seluruh lapisan masyarakat. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk mengamalkan norma-norma Pancasila dan bukan hanya membicarakannya saja.

Suatu Tinjauan Filsafat Atas Cita-cita Negara Pancasila

Kirdi DIPOYUDO

Penetapan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara RI berarti bahwa kelima sila itu menjadi sumber tertib negara dan tertib hukumnya, sehingga menjadi landasan dan jiwa kegiatan negara di segala bidang maupun pembangunan nasionalnya.¹ Negara semacam itu dengan tepat disebut Negara Pancasila. Dalam tulisan ini disajikan suatu tinjauan filsafat mengenai cita-citanya.

PANCASILA SUMBER TERTIB NEGARA

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama berarti bahwa Pancasila menjadi *sumber tertib negara* sehingga negara yang dibangun atasnya adalah Negara Pancasila, yang secara singkat dapat dilukiskan sebagai berikut. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warganya (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial),²

¹Pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967, Pejabat Presiden Soeharto menegaskan: "Karena Pancasila merupakan pandangan hidup kita, maka Pancasila itu pun ... merupakan sumber tertib negara dan tertib hukum serta harus menjadi pedoman dan dilaksanakan Pemerintah, maupun aparaturnya dan oleh setiap pejabat dalam melaksanakan kekuasaan serta tugasnya."

²Lihat Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sebaik mungkin.¹ Jadi tujuan negara adalah manusia dan kesejahteraannya.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, Negara Pancasila dibentuk sebagai suatu persatuan yang meliputi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, sehingga negara RI bukan saja suatu kesatuan politik melainkan juga suatu kesatuan nasional (persatuan Indonesia).² Persatuan Indonesia ini mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka tunggal ika, bersatu dalam berbagai suku, golongan dan daerah. Akan tetapi persatuan atau nasionalisme itu dilengkapi sila-sila Pancasila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab yang menempatkan semua orang sebagai manusia dan bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia yang senasib sepenanggungan. Oleh sebab itu Negara Pancasila wajib menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain dan bekerja sama atas dasar persamaan dan saling menghormati, tidak hanya bagi kepentingan mereka masing-masing, melainkan juga demi terciptanya dunia baru yang lebih baik berdasarkan "kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."³

Sebagai negara nasional, Negara Pancasila adalah suatu negara demokrasi (kerakyatan). Negara nasional bukanlah hanya pemerintah dan aparaturnya, melainkan seluruh bangsa, yaitu pemerintah dan rakyat. Oleh sebab itu negara bukanlah semata-mata urusan seorang atau sejumlah kecil orang, melainkan urusan seluruh bangsa.⁴ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, tetapi rakyat tidak secara langsung melakukan kedaulatannya, melainkan lewat MPR pengejawantahan rakyat. Demokrasi Pancasila adalah suatu kerakyatan perwakilan. Rakyat diwakili oleh orang-orang yang dipilihnya. Selain itu ia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, artinya bukan mayoritas yang menentukan, tetapi hikmat kebijaksanaan atau keputusan akal sehat, yang dihasilkan dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat sebagai mufakat. Hanya sebagai jalan terakhir diadakan pemungutan suara. Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden yang dipilih oleh MPR menjalankan tugasnya pertama-tama dengan menegakkan dan melaksanakan UUD, Ketetapan-ketetapan MPR, khususnya Ketetapan tentang GBHN dan seluruh perundang-undangan lainnya, yang merupakan perumusan dan ungkapan

¹Lihat Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan pasal 27 ayat 2: "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

²Lihat UUD 1945 pasal 1 ayat 1, pasal 26 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 2, pasal 32 dan pasal 36. Lihat juga "Wawasan Nusantara" dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN.

³Pembukaan UUD 1945.

⁴Lihat F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung, 1963), hal. 1.

kemauan rakyat, dan dalam menjalankan tugasnya itu diawasi oleh wakil-wakil rakyat.¹

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa demokrasi Pancasila terjalin erat dengan sila-sila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Oleh sebab itu Negara Pancasila harus menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi manusia, bukan saja orang-orang atau golongan tertentu, melainkan seluruh rakyat. Lagi pula kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat sesuai dengan tuntutan keadilan sosial.² Demokrasi semacam itu mengandung jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuan negara akan dicapai sebaik-baiknya karena apabila rakyat ikut serta dalam urusan negara lewat apa yang disebut "partisipasi sosial, dukungan sosial dan pengawasan sosial," maka kepentingan-kepentingannya akan diperhatikan sewajarnya sehingga kesejahteraan umum terjamin.

Dengan demikian Negara Pancasila di satu pihak menjunjung tinggi martabat mulia dan hak-hak asasi manusia dan di lain pihak memperjuangkan persamaan hakiki antar manusia dan keadilan sosial. Ia menempuh jalan tengah antara paham individualisme yang terlalu menonjolkan individu dan hak-haknya dan paham kolektivisme yang secara berlebihan menekankan kolektivitas atau masyarakat sehingga seolah-olah menelan individu. Negara Pancasila memperhatikan kedua dimensi manusia, yaitu dimensi individual dan dimensi sosial, dalam suatu keseimbangan yang tepat. Manusia diakui dan diperlukan sebagai pribadi otonom yang dikurniai martabat dan hak-hak yang tak terpindahkan, tetapi juga makhluk sosial sampai pada akar-akarnya, yang hanya dalam masyarakat dapat hidup layak sebagai manusia dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya. Hal ini dikukuhkan oleh MPR dalam ketetapan No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang menegaskan: "Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial." Oleh sebab itu dalam ketetapan itu juga ditegaskan bahwa

¹Mengenai penguatan sila kerakyatan dalam UUD 1945 antara lain lihat pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, 2 dan 3, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 11, pasal 18, pasal 19 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 21, pasal 22 dan pasal 30 ayat 1.

²Lihat UUD 1945 pasal 33. Sesuai dengan itu Pejabat Presiden Soeharto menegaskan pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967: "Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi Bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat."

”penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya, agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat,” dan bahwa orang ”tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.”

Akhirnya sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara Pancasila tidak hanya ”menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,”¹ melainkan juga mendorong tumbuhnya hidup keagamaan yang sehat, antara lain dengan menciptakan suasana yang baik baginya dan membina toleransi, sikap saling menghormati dan kerukunan antar umat beragama.² Lagi pula pemerintahnya menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PANCASILA SUMBER TERTIB HUKUM NEGARA

Sebagai dasar negara, Pancasila adalah juga *sumber tertinggi tertib hukum* yang harus mengatur kehidupan negara dan masyarakat, dan dalam rangka itu harus *dituangkan dalam perundang-undangan*, termasuk UUD, peraturan perundangan tertinggi.³ Secara demikian Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD, menjadi pedoman pelaksanaannya dalam undang-undang, kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah. Undang-undang tidak hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tetapi sejauh mungkin harus juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya, sehingga menjadi pelaksanaannya (pelaksanaan obyektif), baik sebagai penerapan, penjabaran dan kesimpulannya maupun sebagai jaminan-jaminan pengamalannya.

Sesuai dengan itu, Pancasila dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai *cita-cita hukum* dan *norma hukum* yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal-pasal Batang Tubuhnya. UUD 1945

¹UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

²Lihat ”Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Ketetapan MPR Nq. II/MPR/1978 tentang P-4.

³Lihat Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang kemudian disahkan oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966. Pemuanan Pancasila dalam perundang-undangan biasanya disebut pelaksanaan Pancasila secara obyektif sebagai lawan pelaksanaan subyektifnya, yaitu pengamalannya oleh masing-masing warga negara. Lihat buku *Pengertian Dasar bagi Pedoman Implementasi Pancasila untuk ABRI* (Departemen Hankam, 1972), hal. 78-82.

adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi yang pada gilirannya menjadi dasar dan sumber perundang-undangan bawahannya. Dengan demikian undang-undang adalah pelaksanaan UUD, dan UUD itu sendiri pelaksanaan Pancasila.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara juga berarti bahwa dalam Negara RI hukum *tidaklah lepas dari moral*, melainkan terikat padanya dengan erat. Moral Pancasila merupakan sumber hukum dan norma-normanya menjadi asas-asas pokok yang harus membimbing para pembuat undang-undang dalam membuat peraturan-peraturan perundangan. Moral Pancasila adalah ukuran undang-undang. Akan tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa setiap norma moral harus dijadikan undang-undang karena hukum negara mempunyai batas-batasnya, yaitu persetujuan rakyat dan kemungkinan pelaksanaan dan penegakannya. Lagi pula soal-soal batin adalah di luar kompetensi negara dan hukumnya. Hanya norma-norma moral yang mengatur tingkah laku atau hubungan-hubungan lahiriah dapat dijadikan undang-undang.

PANCASILA JIWA KEHIDUPAN NEGARA

Sebagai sumber tertib hukum yang mengatur segala bidang kehidupan negara, Pancasila harus *menjiwai* bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan pertahanan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus *dilaksanakan* dalam bidang-bidang itu. Sebagai hasilnya akan terwujud politik Pancasila, ekonomi Pancasila, pendidikan Pancasila, perburuhan Pancasila dan seterusnya. Semuanya itu akan berarti humanisasi masyarakat atau realisasi suatu masyarakat manusiawi, suatu masyarakat yang memungkinkan setiap warganya hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan diri dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sebaik-baiknya.

Kelima sila Pancasila harus menjiwai seluruh kehidupan negara, tetapi secara istimewa *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Hal ini pertama-tama berarti bahwa di Indonesia setiap orang harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berakal budi, yang sama derajatnya, yang sama hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasinya. Sebagai makhluk yang berakal budi, setiap orang adalah pribadi yang mandiri tetapi juga sosial sampai akar-akarnya. Sebagai pribadi, setiap orang mempunyai kewajiban asasi untuk memelihara hidupnya, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sebaik mungkin, sehingga tercapai tujuan eksistensinya. Dalam rangka itu manusia dikaruniai hak-hak asasi yang tidak boleh dipindahkan atau diperkosa. Hak-hak ini semakin diakui di mana-mana sejalan dengan kemajuan umat manusia. Dalam Dekla-

rasi Hak-hak Asasi Manusia PBB, hak-hak itu dirumuskan cukup lengkap dan dinyatakan sebagai cita-cita hukum yang hendaknya dituangkan dalam perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa. Negara dan hukumnya menurut filsafat yang juga mendasari Pancasila pertama-tama dimaksud untuk menjamin agar setiap warganya dapat menikmati hak-hak itu secara aman dan tertib.¹

Sesuai dengan rumusannya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut *keadilan*, yaitu sila yang mewajibkan manusia maupun masyarakat dan negara untuk memberi masing-masing apa yang menjadi haknya. Keadilan mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak itu.² Dalam rangka itu diperlukan undang-undang yang merumuskan dan menetapkan, lagi pula mengaturnya agar pelaksanaan hak-hak orang yang satu tidak melanggar hak-hak orang yang lain. Manusia tidak hanya berhak untuk menuntut hak-haknya, tetapi juga wajib mengakui dan menghormati hak-hak sesamanya. Salah satu tugas negara ialah menjamin agar hak-hak semua dan setiap warganya dihormati. "Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang hanya harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat kesusilaan, tata tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis," demikian ditetapkan pada pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB.

Selanjutnya keadilan harus diambil dalam arti yang menyeluruh dan juga mencakup *keadilan sosial* karena maksud keadilan bukanlah semata-mata menjamin hak-hak orang-orang atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat dan negara, tetapi hak-hak semua orang. Dalam rangka itu negara tidak hanya wajib merumuskan sejelas dan selengkap mungkin hak-hak itu, tetapi juga menjamin agar tiap-tiap warganya dapat menikmatinya secara aman (kepastian hukum). "Tujuan setiap masyarakat nasional ialah membina dan mendorong, dalam dan lewat kerja sama, perkembangan selengkap mungkin semua kemampuan pribadi semua warganya; dan tujuan ini ialah keadilan atau 'pengaturan tepat' masyarakat semacam itu, dan oleh sebab itu dapat disebut keadilan sosial."³

¹Lihat Pembukaan UUD 1945 dan "Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4.

²Mengenai keadilan lebih lanjut lihat karangan kami "Arti dan Isi Keadilan Sosial," dalam *Analisa*, Agustus 1980.

³Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (Oxford, 1967), hal. 123.

Selain itu kemanusiaan Pancasila adalah kemanusiaan yang *beradab*, artinya kemanusiaan yang mewajibkan kita untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan martabatnya yang mulia. Antara lain kita dilarang memperlakukan seorang di luar batas peri kemanusiaan secara kejam atau main hakim sendiri untuk mendapatkan apa yang kita pandang sebagai hak kita. Kita hendaknya memperjuangkan hak-hak itu secara beradab, lewat pengadilan yang teratur, agar kepastian hukum terjamin. "Tiada seorang jua pun boleh dianiaya, atau diperlakukan secara kejam tanpa mengingat kemanusiaan atau dengan perlakuan atau hukuman yang merendahkan derajat (degradating)," demikian bunyi pasal 5 Deklarasi PBB tersebut.

Sebagai dasar negara, Pancasila selanjutnya membantu kita menetapkan sikap terhadap segala macam masalah kenegaraan, baik dalam maupun luar negeri. "Dengan dasar falsafah Negara itu kita dapat menentukan pendirian kita terhadap segala macam masalah pokok yang kita hadapi, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri," demikian Pejabat Presiden Soeharto menegaskan dalam pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967. Lagi pula Pancasila memberikan bimbingan kepada segala gerak kegiatan negara dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh aparturnya dalam pelaksanaan tugasnya.

PANCASILA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi dasar atau landasan pembangunan nasional di segala bidang. Hal itu pertama-tama berarti bahwa *manusia harus diberi tempat yang sentral* dalam pembangunan,¹ tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai tujuannya. "Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan," demikian Presiden Soeharto menegaskan pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Pembangunan nasional adalah untuk kepentingan manusia Indonesia, untuk kesejahteraan lahir batinnya. "... tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya," demikian ditegaskan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya pada Peringatan Dies Natalis ke-20 IKIP Bandung, 5 Desember 1974.

Dari prinsip itu antara lain disimpulkan bahwa pembangunan nasional harus memberikan prioritas tinggi kepada *perluasan kesempatan kerja*, agar

¹Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN antara lain ditegaskan: "Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembanguann manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia."

setiap orang yang mampu dan mau dapat bekerja secara produktif, sebanyak mungkin sesuai dengan kecakapan dan keinginannya, dan menjamin agar ia dapat bekerja dengan syarat-syarat kerja yang baik dan balas karya yang wajar. Sesuai dengan itu dalam pasal 27 UUD 1945 ditetapkan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Bagi kebanyakan orang kesempatan kerja merupakan satu-satunya sumber kesejahteraan bagi mereka dan keluarga mereka. Selain itu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi melainkan juga nilai kemanusiaan yang tinggi.¹ Manusia tidak dapat hidup sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap sekalipun kebutuhan materialnya sehari-hari dicukupi.

Sehubungan dengan itu Presiden Soeharto menandakan: "Bahwa peningkatan produksi adalah untuk kebahagiaan dan meningkatkan martabat manusia; bukan sebaliknya, manusia hanya akan menjadi alat produksi dan merosotnya martabat manusia. Apabila ini terjadi, maka betapapun meningkat dan besarnya produksi terpaksa harus dikatakan bahwa pembangunan tidak mencapai tujuan dan cita-citanya."² Dengan perkataan lain, tujuan pembangunan nasional ialah memungkinkan setiap warga negara hidup layak sebagai manusia dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya sebaik mungkin.

Sesuai dengan keadilan sosial, maka tujuan pembangunan nasional adalah *seluruh rakyat*, bukan orang-orang atau golongan-golongan tertentu. "Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat," Pejabat Presiden Soeharto menegaskan pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967. "Karena itu dalam usaha memajukan ekonomi telah harus dimulai langkah-langkah untuk meletakkan dasar bagi keadilan sosial; adil dalam memikul beban pembangunan dan adil dalam menikmati hasil pembangunan. Usaha ini menonjolkan dua segi. *Pertama* pembangunan harus berarti peningkatan hidup rakyat banyak; dan yang *kedua*, pembangunan harus merata ke seluruh pelosok tanah air. Dalam arti ini telah terkandung keharusan pembangunan sampai ke desa-desa," demikian pidato Presiden Soeharto pada Sidang Umum MPR, 13 Maret 1973.

Dengan demikian pembangunan nasional kita harus berupa pembangunan kembali masyarakat kita menjadi *masyarakat manusiawi* (humane society), yang memungkinkan setiap warganya hidup layak sebagai manusia. Itulah masyarakat Pancasila yang oleh Presiden Soeharto dirumuskan sebagai berikut:

¹Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, Bab III B.7.

²Pidato pada Pembukaan Seminar Nasional Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila di Jakarta, 4 Desember 1974.

"Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialis religius dengan ciri-ciri pokok: tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme; karenanya kita harus bersama-sama menghapuskannya dan menghayati hidupnya dengan kewajiban: taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada Tanah Air, kasih sayang pada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Penghayatannya harus dimulai dari pribadi-pribadi dengan jalan selalu mengendalikan kepentingan-kepentingan pribadinya untuk memperbesar kewajibannya sebagai makhluk sosial terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Memikirkan bersama, untuk kemudian menerima bersama dan melaksanakan bersama-sama pancaran dan isi dan jiwa Pancasila sebagai pegangan di segala segi kehidupan kita merupakan tanggung jawab kita di masa kini dan masa nanti."¹

PANCASILA DASAR PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Dengan sendirinya Pancasila adalah juga dasar pengembangan kebudayaan nasional karena pembangunan nasional adalah menyeluruh dan meliputi segala bidang kehidupan masyarakat dan negara seperti ditegaskan oleh MPR dalam ketetapannya No. II/MPR/1983 tentang GBHN:

"Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya; bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air; bahwa bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional; secara ringkas disebut masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila."

Pertama, itu berarti bahwa Pancasila menjadi *pedoman evaluasi dan seleksi* atau penyaringan unsur-unsur kebudayaan yang digunakan untuk menyusun dan menyempurnakan kebudayaan nasional kita yang sedang berkembang. Unsur-unsur yang bertentangan dengan kelima sila itu harus kita buang secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsur yang selaras kita pelihara dan kita kembangkan.² Hal itu tidak hanya berlaku dengan kebu-

¹Pidato pada Peringatan Dies Natalis ke-25 Universitas Indonesia di Jakarta, 15 Pebruari 1975.

²Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang GBHN Bab IV mengenai Pengembangan Kebudayaan.

dayaan-kebudayaan daerah, melainkan juga dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Kita tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang positif dan dapat memperkaya kebudayaan kita serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa kita, tetapi harus bersedia mengambil alihnya, selama unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹ Kita memerlukan nilai-nilai positif itu untuk pembaharuan dalam proses pembangunan nasional. "Pembaruan tidak lain adalah usaha dari bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern ... Penerapan unsur dari luar dan penerapan hukum-hukum ekonomi yang rasional misalnya tidak harus menghilangkan warna dasar daripada kepribadian sendiri," demikian ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada, 19 Desember 1974.

Kedua, Pancasila menjadi *pedoman pengarah dan pengembangan kebudayaan kita* agar kebudayaan nasional kita benar-benar dapat memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi arah dan membimbing seluruh kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan maupun seluruh pembangunan nasional kita.² Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kebudayaan bukanlah semata-mata satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping bidang-bidang lainnya seperti politik dan ekonomi, melainkan seluruh kehidupan kita sebagai bangsa yang mencakup bidang-bidang itu. Dengan demikian kebudayaan harus menjadi *strategos atau panglima kehidupan dan pembangunan nasional kita*.³ Agar berhasil, pembangunan nasional harus diberi dimensi budaya. Dan hal itu terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen dalam bidang-bidang tersebut. Secara konkrit itu berarti menyusun dan melaksanakan politik Pancasila, ekonomi Pancasila, sistem sosial Pancasila dan seterusnya, yang sebagai keseluruhan dapat disebut masyarakat Pancasila, yang pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi, sasaran akhir pembangunan nasional.

Semuanya itu kita lakukan dengan tujuan lebih lanjut memungkinkan setiap warga masyarakat kita *hidup layak sebagai manusia*, mengembangkan segala kemampuannya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya selengkap mungkin. Seperti kita lihat di atas, Pancasila menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan negara dan pembangunan nasional kita.

¹Lihat Penjelasan pasal 32 UUD 1945.

²Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN Bab IV mengenai Pengembangan Kebudayaan.

³Lihat C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta, 1976), khususnya hal. 9-33.

PENUTUP

Dari uraian di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan berikut. *Pertama*, karena negara dan kebudayaan nasional Indonesia harus dibangun atas dasar Pancasila, maka negara dan kebudayaan kita akan mempunyai makna susila. Dalam evaluasi dan seleksi unsur-unsur yang digunakan untuk menyusun kebudayaan kita, Pancasila merupakan norma tertinggi. Unsur-unsur yang melanggar atau merugikan kesusilaan atau moral rakyat harus ditolak. Selain itu Pancasila harus menjiwai bidang-bidang kehidupan negara dan dengan maksud itu dituangkan dalam ketentuan-ketentuan perundangan yang mengaturnya. Secara demikian bidang-bidang itu tidak menghambat atau merugikan kehidupan susila rakyat, melainkan menunjangnya.

Kedua, untuk mendapatkan makna susila itu kehidupan dan kebudayaan nasional kita pertama-tama harus berorientasi pada manusia dengan menempatkannya sebagai pribadi yang mempunyai martabat mulia dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Dengan perkataan lain, negara dan kebudayaan nasional kita harus memungkinkan semua dan setiap warga masyarakat hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya selengkap mungkin secara merdeka sesuai dengan kata hatinya.

Ketiga, dengan maksud itu pembangunan nasional kita harus berarti pembangunan kembali masyarakat kita menjadi masyarakat manusiawi dengan melaksanakan Pancasila dalam segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. Masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi, suatu masyarakat di mana martabat dan hak-hak asasi setiap warganya dijunjung tinggi (kepastian hukum) dan tersedia baginya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup, yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Masyarakat semacam itu juga melihat bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia dan bekerja sama dengan mereka untuk membangun dunia baru yang lebih baik berdasarkan "kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Suatu Tinjauan Atas Kehidupan Politik di Indonesia 1983

M. DJADIJONO*

Menyongsong dimulainya tahun 1984, kiranya ada baiknya dibuat suatu catatan mengenai apa yang telah terjadi dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia selama tahun 1983. Pembuatan catatan semacam itu paling kurang mengandung tiga kepentingan. *Pertama*, sebagai alat bantu bagi daya ingat kita mengenai apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang telah diperbuat oleh bangsa Indonesia sendiri dalam tahun 1983 tersebut. *Kedua*, sebagai bahan untuk mawas diri dalam rangka mencari alternatif yang lebih baik untuk tahun berikutnya. *Ketiga*, sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kehidupan perpolitikan di Indonesia selama setahun yang lalu, baik berkenaan dengan hal-hal yang positif maupun mengenai kecenderungan-kecenderungan yang kurang menguntungkan. Dengan adanya catatan-catatan seperti itu, kiranya dapat diharapkan bahwa tindakan-tindakan politik yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dapat diusahakan secara lebih baik.

GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN TAHUN 1983

Memasuki tahun 1983 yang lalu, bangsa Indonesia tetap bertekad untuk melaksanakan pembangunan secara terus-menerus. Dalam rangka itu ternyata bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup rumit, baik karena pengaruh perkembangan yang terjadi dalam percaturan politik global dan regional maupun pengaruh dari usaha-usaha bangsa Indonesia sendiri untuk terus mengadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap apa yang telah dicapai selama ini.

Dalam skala internasional maupun regional, rumitnya permasalahan yang mau tidak mau mempengaruhi kehidupan negara dan bangsa Indonesia itu an-

*Staf CSIS.

tara lain dapat dilihat dari penegasan-penegasan Presiden Soeharto seperti berikut ini: (1) keamanan dan ketenteraman dunia terasa tetap tidak terjamin. Perlombaan senjata antara kekuatan-kekuatan besar dunia belum ada tanda-tanda mereda, bahkan sebaliknya diam-diam terus berlangsung. Pergolakan dan ketegangan di berbagai kawasan dunia masih berlangsung terus; (2) perkembangan dunia yang terjadi tahun-tahun terakhir ini dan mungkin masih akan berlangsung terus dalam tahun-tahun mendatang tidak selamanya sejalan dengan kepentingan pembangunan kita; (3) dunia yang penuh dengan gejolak dan kerawanan itu makin mencemaskan lagi karena resesi ekonomi dunia yang tidak kunjung reda, dan bahkan sulit diramalkan kapan akan berakhir; (4) kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan dunia seperti itu jelas mempengaruhi gerak majunya pembangunan bangsa Indonesia;¹ (5) apabila tepat setahun yang lalu saya mengatakan bahwa tahun 1982 bukanlah tahun yang terlalu cerah dan harus kita masuki dengan keprihatinan dan kewaspadaan, maka semangat keprihatinan dan kewaspadaan serta kerja keras itu harus kita tingkatkan dalam tahun 1983.²

Sementara itu, dalam skala nasional kehidupan perpolitikan kita secara garis besarnya dapat dikatakan diwarnai oleh berbagai permasalahan politis strategis, politis ideologis, politis organisatoris, politis kemasyarakatan maupun politis ekonomis.

Dalam kehidupan politik yang bersifat strategis, bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan mengenai pentingnya memperkuat kerangka landasan pembangunan nasional dalam rangka "take-off" atau tinggal landas menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara itu, dalam kehidupan politik yang bersifat ideologis, sebagai akibat timbulnya berbagai peristiwa politik yang kurang baik selama pelaksanaan kampanye Pemilu 1982, bangsa Indonesia dihadapkan pada tuntutan mengenai pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berpolitik. Dalam kehidupan politik organisatoris, khususnya organisasi-organisasi kekuatan sosial politik, sebagai akibat terjadinya pengalaman-pengalaman yang kurang menguntungkan selama pelaksanaan Pemilu 1982 yang lalu, bangsa Indonesia dihadapkan pada perlunya konsolidasi kekuatan-kekuatan sosial politik. Sementara itu, berkenaan dengan kehidupan politik kemasyarakatan, sesuai dengan amanat GBHN (1978), bangsa Indonesia dihadapkan pada tuntutan pemantapan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sedangkan dalam ke-

¹Lihat *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Tahun 1983, Triwulan ke I, hal. 9-10.

²Lihat *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Tahun 1982, Triwulan ke IV, hal. 650.

hidupan politis ekonomis, bangsa Indonesia dihadapkan pada kesulitan-kesulitan perekonomian, baik karena resesi ekonomi yang melanda dunia maupun karena "terbatasnya" sumber daya ekonomi. Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas, berikut ini dipaparkan berbagai peristiwa maupun pemikiran serta tindakan-tindakan politik yang terjadi dalam tahun 1983.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS STRATEGIS

Memasuki awal tahun 1983, kehidupan perpolitikan di Indonesia diwarnai oleh pemikiran-pemikiran dan peristiwa yang bersifat politis strategis, misalnya munculnya berbagai saran kepada MPR mengenai ketetapan-ketetapan yang perlu dibuat. Pemikiran-pemikiran politis strategis itu mencapai puncaknya dalam Sidang Umum MPR tanggal 1-11 Maret 1983. Berbagai pemikiran yang berkembang di sekitar Sidang Umum MPR itu dapat dikatakan bersifat politis strategis karena apa pun yang diputuskan olehnya akan menentukan kehidupan dan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia untuk masa lima tahun kemudian dan mengikat semua pihak, terlepas dari kemungkinan-kemungkinan adanya sementara kalangan yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil.

Sebagaimana diketahui, Sidang Umum MPR tanggal 1-11 Maret 1983 yang lalu itu telah berlangsung secara sangat lancar, tertib dan aman. Sidang Umum MPR itu telah menghasilkan 8 buah ketetapan, yaitu Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib; Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN; Ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum; Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum; Ketetapan MPR No. V/MPR/1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR dikaitkan dengan Pemberian Penghargaan kepada Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai Bapak Pembangunan; Ketetapan MPR No. VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1983-1988; Ketetapan MPR No. VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris MPR Dalam Rangka Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional; Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Jenderal (Purn.) Umar Wirahadikusumah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.¹

Putusan-putusan MPR tersebut merupakan perumusan strategi pembangunan bangsa dan negara untuk masa lima tahun mendatang. Dengan telah

¹Ketetapan MPR RI Tahun 1983 dan Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR-RI tanggal 1 Maret 1983, Jakarta, BP-7 Pusat, 1983.

dihasilkannya putusan-putusan MPR itu jalannya kehidupan bangsa dan negara untuk masa lima tahun mendatang telah diperjelas. Persoalan yang tinggal sekarang adalah bagaimana melaksanakan strategi pembangunan yang telah diputuskan itu. Berkenaan dengan pelaksanaan Tap-tap MPR tersebut telah muncul berbagai pemikiran. Di antara pemikiran-pemikiran itu, yang menonjol adalah mengenai pelaksanaan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, terutama pelaksanaan ketentuan bahwa: "... demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas," yang kemudian populer dengan sebutan asas tunggal Pancasila. Pemikiran-pemikiran tersebut secara dominan mewarnai kehidupan perpolitikan Indonesia dalam tahun 1983.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS IDEOLOGIS

Tahun 1983 yang lalu, sebagaimana diketahui bersama, juga diwarnai oleh peristiwa maupun pemikiran yang bersifat politis ideologis. Berbagai pemikiran dan peristiwa yang bersifat politis ideologis itu muncul secara merata dalam berbagai media cetak. Peristiwa-peristiwa dan pemikiran politis ideologis itu mulai setelah penetapan MPR bahwa setiap kekuatan sosial politik di Indonesia harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan penegasan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut tampak dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN Bab IV.D. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Bagian Umum butir 3 dan Bab IV.D. Bagian Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri No. 1.h.; serta tercantum dalam Bab V (Penutup).

Setelah adanya ketentuan-ketentuan GBHN tersebut, berbagai reaksi dan tanggapan mulai bermunculan, baik berupa pemikiran maupun terjadinya aktivitas-aktivitas organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan. Berkenaan dengan pemikiran-pemikiran ideologis itu antara lain ada pendapat yang mengatakan bahwa asas tunggal Pancasila tidak berlaku bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan.¹ Di samping itu ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan asas tunggal Pancasila itu berlaku bagi segenap elemen kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sebagai konsekuensi logis ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.

Di antara aktivitas-aktivitas organisasi sosial politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan dapat disebutkan: (1) Kongres HMI di Medan bulan

¹Lihat Tajuk *Pelita*, 9 Juni 1983; artikel dalam *Kompas*, 27 Juni 1983; wawancara dalam *Kompas*, 1 Juli 1983.

Mei 1983 yang mengambil putusan: tetap menggunakan asas Islam sebagai asas organisasi; (2) Mukernas GMKI di Surabaya tanggal 26 Juni - 1 Juli 1983 yang memutuskan bahwa penerapan asas tunggal Pancasila masih perlu pengkajian; (3) Munas ke III Golkar di Jakarta tanggal 20-25 Oktober 1983 yang memutuskan menerima asas tunggal Pancasila; (4) pernyataan Ketua Umum DPP PPP Dr. H.J. Naro bahwa PPP menerima asas tunggal Pancasila;¹ (5) pernyataan Ketua Umum DPP PDI Prof.Dr. Soenawar Soekowati bahwa PDI menerima asas tunggal Pancasila;² (6) Kongres GMNI di Lembang Bandung tanggal 19-21 Nopember 1983 yang menerima asas Pancasila sebagai asas organisasi (disertai dengan interpretasi atas Pancasila); (7) Munas Alim Ulama NU di Situbondo tanggal 18-21 Desember 1983 menerima Pancasila sebagai asas organisasi (disertai dengan interpretasi terhadap Pancasila).³

Di samping itu ada pula aktivitas-aktivitas organisasi yang "ditunda," misalnya Mukhtar Muhammadiyah. Penundaan dilakukan sambil menunggu keluarnya UU Keormasan yang mengatur penerapan asas tunggal Pancasila bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan.⁴ Sedangkan siaran pers Pengurus Pusat PMKRI tanggal 21 Nopember 1983 menegaskan "Pancasila memang merupakan asas negara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun hal itu bukan berarti bahwa Pancasila juga harus diberlakukan sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi kemasyarakatan. PMKRI berpendapat bahwa penerapan asas tunggal Pancasila merupakan monolitisasi dan bertentangan dengan demokrasi."⁵ Dari semuanya itu tampak secara jelas bahwa penetapan asas tunggal Pancasila tersebut telah memperoleh tanggapan pro maupun kontra. Tanggapan-tanggapan mengenai penerapan asas tunggal itu secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok yang pertama menolak secara apriori; yang kedua menerima dengan ragu-ragu; dan yang ketiga menerima dengan penuh kesadaran. Adanya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian tersendiri di dalam memasuki tahun 1984.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS ORGANISATORIS

Sebagai konsekuensi logis dari putusan MPR yang menetapkan bahwa setiap kekuatan sosial politik harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya

¹Sambutan Ketua Umum DPP PPP pada Munas III Golkar.

²Sambutan Ketua Umum DPP PDI dalam Munas III Golkar.

³Lihat *Pelita*, 22 Desember 1983.

⁴Lihat *Merdeka*, 11 Nopember 1983.

⁵*Kompas*, 23 Nopember 1983.

asas dan bertepatan dengan ketentuan Anggaran Dasar berbagai organisasi kekuatan sosial politik yang ada, maka berbagai aktivitas organisasi-organisasi kekuatan sosial politik ikut mewarnai kehidupan perpolitikan di Indonesia dalam tahun 1983. Dalam bulan Oktober 1983, suasana politis organisatoris disemarakkan dengan terjadinya Musyawarah Nasional ke III Golongan Karya. Selanjutnya dalam bulan Nopember suasana perpolitikan dihangatkan oleh adanya rencana Mukhtar PPP. Bersamaan dengan adanya rencana Mukhtar PPP itu, suasana lebih dihangatkan lagi oleh adanya keinginan dari sementara anggota PPP agar Mukhtar memutuskan untuk meminta kesediaan Jenderal (Purn.) Soeharto menjadi "Pembina Utama" PPP.¹ Ide semacam ini sebagaimana diketahui telah memperoleh tanggapan positif dan dukungan dari sementara kalangan dalam PDI.²

Adanya usul dari sementara kalangan dalam PPP dan PDI untuk meminta Jenderal (Purn.) Soeharto menjadi Pembina Utama partai politik itu sempat mengundang berbagai komentar dan tanggapan dari berbagai pihak. Dari sekian banyak tanggapan dan komentar mengenai usul sementara kalangan untuk meminta kesediaan Jenderal (Purn.) Soeharto menjadi Pembina Utama PPP itu, yang sangat menarik adalah Tajuk Rencana harian *Berita Buana*, *Sinar Harapan* dan *Suara Karya*, dan tanggapan dari Ketua DPR/MPR serta staf pengajar FIS-UI.

Menanggapi usul sementara kalangan dalam PPP, Tajuk Rencana harian *Berita Buana* tanggal 17 Nopember 1983 antara lain menyatakan hal-hal berikut: (1) Jenderal (Purn.) Soeharto dengan Golkar tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang sangat erat merupakan produk sejarah perjuangan Orde Baru sejak lahirnya dan berkaitan dengan sejarah perkembangan kehidupan politik jaman Orde Baru; (2) dengan tumbangnya PKI dan kekuasaan Bung Karno, pihak-pihak tertentu hendak memanfaatkan situasi untuk berkuasa. Hal itu tercermin dari sikapnya tidak mau mengutuk PKI yang mendalangi G-30-S. Mereka menganggap bahwa tumbangya PKI dan kekuasaan Bung Karno seolah-olah sekedar turunnya kekuasaan suatu partai politik dan tokoh politik untuk digantikan oleh partai dan tokoh saingannya.

Dalam pada itu, Tajuk Rencana harian *Sinar Harapan* tanggal 16 Nopember 1983 menyatakan bahwa: (1) Bung Karno pernah mencoba untuk mengkombinasikan posisi sebagai lambang persatuan dan kesatuan nasional dengan fungsi Bung Karno sebagai pemimpin pemerintahan. Hal itu dilakukannya dengan cara menghimpun semua kekuatan politik di sekitar meja laksana anggota-anggota satu keluarga. Namun seperti kita ketahui, sistem

¹Lihat *Kompas*, 14 Nopember 1983 dan *Pelita*, 16 Nopember 1983.

²Lihat *Suara Karya*, 15 Nopember 1983.

politik yang dibangun selama Demokrasi Terpimpin itu tidak begitu berhasil; (2) dalam Orde Baru kita mengembangkan pendekatan yang baru untuk mengkombinasikan pembinaan persatuan bangsa sebaik-baiknya dengan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Usaha kita itu masih berjalan terus sampai sekarang. Itulah yang kita sebut dengan pengembangan Demokrasi Pancasila.

Sedangkan Tajuk Rencana harian *Suara Karya* tanggal 18 Nopember 1983 antara lain menyatakan bahwa: "keinginan PPP menjadikan Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai 'Pembina Utama' PPP itu mengandung unsur kultus individu. Berbeda dengan posisi dalam Golkar: Ketua Dewan Pembina menunjukkan adanya kolektivitas. Dengan demikian, posisi Jenderal (Purn.) Soeharto dalam Golkar tidak mengandung unsur-unsur kultus individu."

Ketua DPR/MPR Amirmachmud, menanggapi usul sementara kalangan dalam PPP itu berpendapat: "Sejak Orde Baru, Pak Harto ikut secara langsung membangun dan membesarkan Golkar. Sebaliknya hal serupa tidak dilakukannya secara langsung kepada Parpol. Dengan demikian Pak Harto memang orang Golkar. Oleh karenanya adalah logis bila Pak Harto menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Adanya keinginan dari kalangan Parpol untuk menjadikan Pak Harto sebagai Pembina Utama Parpol hanya akan menyudutkan dan membahayakan Pak Harto. Bahkan hal itu bisa merusak mekanisme dan prosedur Demokrasi Pancasila, kecuali kalau ada maksud-maksud lain."¹ Hampir senada dengan Ketua DPR/MPR, staf pengajar FIS-UI Dr. Nazaruddin Sjamsuddin berpendapat bahwa: "Merupakan suatu keanehan bila Pak Harto juga diminta menjadi Pembina Utama Parpol, sebab Pak Harto memang orang Golkar. Apalagi bila diingat bahwa Parpol tidak masuk dalam Kabinet. Untuk menegaskan istilah Pembina Utama perlu kehati-hatian."²

Komentar-komentar tersebut di atas sangat menarik untuk diamati dan direnungkan, terutama dalam rangka kewaspadaan nasional. Hal itu disebabkan karena pernyataan-pernyataan/tanggapan tersebut di atas memang mengandung hal-hal yang pada pokoknya mengajak tetap waspada. Perlunya kewaspadaan nasional itu kiranya lebih relevan lagi bila kita ingat bahwa ketika akan memasuki tahun 1983 yang lalu, Presiden Soeharto juga menekankan pentingnya kewaspadaan. Di samping itu, Presiden Soeharto pernah menegaskan: "Kita juga harus berhati-hati dan waspada dalam memberi isi ke dalam praktek kehidupan politik dan ketatanegaraan. ... Kita juga sedang berusaha agar identitas kelompok tidak merusak nilai-nilai dasar yang men-

¹*Suara Karya*, 17 Nopember 1983.

²*Ibid.*

jadi kekuatan utama bangsa kita.”¹ Pada kesempatan lain, Presiden Soeharto menegaskan: ”... saya perlu mengingatkan kita semua, agar kita tidak lengah dan merasa puas diri. Bahaya terhadap Pancasila tetap masih ada dan dapat datang dari luar maupun dari dalam.”²

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS KEMASYARAKATAN

Dalam bidang politik kemasyarakatan, tahun 1983 suasana disemarakkan oleh berbagai peristiwa kongres organisasi-organisasi kemasyarakatan. Di samping itu juga adanya Mukernas maupun Rapat DPP diperluas. Peristiwa-peristiwa itu misalnya adalah: (1) Kongres HMI di Medan bulan Mei 1983; (2) Mukernas GMKI di Surabaya tanggal 29 Juni - 1 Juli 1983; (3) Kongres GMNI di Lembang, Bandung tanggal 19-21 Nopember 1983; (4) Sidang DPP GAMKI diperluas di Jakarta tanggal 19 Nopember 1983. Kecuali itu PMKRI mengadakan kongres dalam bulan Desember 1983.

Sementara itu, organisasi-organisasi kemasyarakatan lain yang bernafaskan keagamaan juga mengadakan aktivitas-aktivitasnya, misalnya Munas Alim Ulama NU, Sidang Tahunan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI).

Yang sangat menarik dari berbagai aktivitas organisasi-organisasi kemasyarakatan itu menyangkut masalah penerimaan mereka terhadap ketentuan MPR mengenai asas tunggal Pancasila. Di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut terdapat variasi pandangan dan sikap terhadap pelaksanaan asas tunggal Pancasila. Variasi tanggapan dan sikap mengenai asas tunggal Pancasila tampaknya masih akan berlangsung terus sampai tahun 1984. Inilah kiranya beban tugas yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun 1984 ini.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG BERSIFAT POLITIS EKONOMIS

Sebagaimana diketahui, memasuki tahun 1983 yang lalu, bangsa Indonesia dihadapkan pada kesulitan-kesulitan perekonomian sebagai akibat terjadinya

¹Lihat Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 16 Agustus 1980 dalam *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1980, Triwulan ke III, hal. 298-299.

²Lihat Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 15 Agustus 1981 dalam *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981, Triwulan ke III, hal. 433.

resesi ekonomi dunia. Usaha-usaha mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut ikut pula mewarnai suasana kehidupan politik kita dalam tahun 1983 itu. Dalam tahun 1983 itu, suasana kehidupan politis ekonomis kita ditandai oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter sebagai berikut: (1) pada tanggal 7 Januari 1983, pemerintah menaikkan harga BBM; (2) tanggal 30 Maret 1983, pemerintah melakukan devaluasi nilai Rupiah terhadap Dollar AS; (3) pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah mengambil kebijakan untuk menghapuskan pagu kredit bank. Di samping itu pemerintah juga menaikkan suku bunga Tabanas; (4) dalam bulan Nopember, pemerintah mengajukan berbagai RUU Perpajakan dalam rangka mengganti peraturan-peraturan perpajakan yang selama ini berlaku, di samping juga untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Berbagai kebijakan tersebut di atas cukup dominan mewarnai kehidupan politis ekonomis Indonesia dalam tahun 1983. Dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan itu, yang menjadi permasalahan adalah bahwa menghadapi berbagai kebijakan pemerintah itu, pendapatan mereka yang berpenghasilan tetap belum memperoleh penyesuaian. Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Repelita IV yang sangat penting, yakni era penciptaan kerangka landasan pembangunan nasional, masalah nasib mereka yang berpenghasilan tetap khususnya pegawai negeri kiranya perlu memperoleh perhatian tersendiri, terutama karena pegawai negeri merupakan pelaksana utama usaha-usaha menciptakan kerangka landasan pembangunan nasional itu. Dalam posisi itu, nasib mereka memerlukan perhatian khusus.

Melihat timbulnya berbagai permasalahan seperti tersebut di atas, mungkin akan timbul pertanyaan mengapa permasalahan-permasalahan itu timbul dan apa sebabnya ia timbul. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapatlah diuraikan seperti di bawah ini.

PENYEBAB TIMBULNYA PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

Berbagai kesulitan yang dialami oleh berbagai bangsa di dunia, baik karena perang maupun sebagai akibat resesi ekonomi dunia, sudah dapat dipastikan mempunyai dampak terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Hal itu adalah karena sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, bangsa dan negara Indonesia bukan bangsa dan negara yang tertutup untuk pengaruh dari luar dan juga merupakan negara-bangsa yang tidak menutup diri. Menghadapi berbagai persoalan dunia yang dapat dipastikan mempunyai dampak terhadap kehidupan negara dan bangsa Indonesia itu, yang sangat diperlukan adalah memperkuat ketahanan nasional di segala bidang.

Sementara itu, permasalahan politis strategis timbul ke permukaan karena UUD 1945 memuat suatu ketentuan bahwa sekali dalam lima tahun perlu diadakan peninjauan ulang mengenai gerak dan langkah perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Peninjauan itu dimaksudkan untuk menampung berbagai aliran pemikiran maupun keinginan yang timbul dalam masyarakat dalam rangka menentukan haluan negara yang baru. Berkenaan dengan itu, satu hal yang menjadi tolok ukur adalah kepentingan nasional, kontinuitas pelaksanaan pembangunan, tetap dipertahankannya Pancasila dan UUD 1945 serta pelaksanaannya secara murni dan konsekuen.

Permasalahan politis ideologis yang menampakkan dirinya dalam terjadinya perbedaan pendapat dan pandangan serta sikap di antara kelompok masyarakat Indonesia mengenai penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap kekuatan sosial politik tampaknya disebabkan oleh hal-hal berikut. *Pertama*, adanya perbedaan tafsir mengenai ketentuan GBHN, khususnya ketentuan asas tunggal Pancasila. *Kedua*, masih berkembangnya sikap masyarakat terhadap Pancasila itu sendiri. Di satu pihak Pancasila telah ditetapkan menjadi dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa, tetapi di lain pihak ada sementara pandangan dalam masyarakat yang menolak Pancasila atau ragu-ragu terhadap Pancasila.¹

Sementara itu, munculnya peristiwa-peristiwa yang bersifat politis organisatoris dan politis kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai akibat hal-hal berikut. *Pertama*, ia merupakan konsekuensi logis dari adanya ketentuan GBHN mengenai asas tunggal Pancasila. Dengan adanya ketentuan tersebut, semua organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan diharap dan bahkan harus menyesuaikan diri. *Kedua*, hal itu adalah karena tuntutan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga berbagai organisasi yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di depan kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, dalam tahun 1983 kehidupan sosial politik di Indonesia cukup semarak. Ia diwarnai oleh berbagai kegiatan dan pemikiran-pemikiran yang sangat penting, baik itu dilihat dari aspek politis strategis, politis organisatoris maupun politis kemasyarakatan.

Kedua, berbagai peristiwa dan pemikiran yang berkembang dalam kehidupan perpolitikan itu ternyata diwarnai pula oleh berbagai pro dan kontra.

¹ Lihat *Suara Karya*, 29 Agustus 1983.

Oleh sebab itu tugas besar yang menghadang bangsa Indonesia dalam memasuki tahun 1984 adalah menyelesaikan berbagai pro dan kontra yang sempat timbul dalam tahun 1983 tersebut, khususnya mengenai pelaksanaan asas tunggal. Pelaksanaan asas tunggal Pancasila perlu memperoleh prioritas karena seperti dikatakan Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1983 yang lalu: "Pemasyarakatan ideologi Pancasila merupakan prasyarat bagi memantapkan pelaksanaan pembangunan selanjutnya sebagai pengalaman Pancasila dan untuk menjamin kelestarian kehidupan dan negara kita."

Ketiga, dari berbagai tanggapan yang muncul, tampak pula adanya sementara kalangan yang menekankan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap berbagai pemikiran dan peristiwa politik yang terjadi, misalnya Tajuk Rencana Harian *Berita Buana*, *Sinar Harapan* dan *Suara Karya*.

Keempat, sesuai dengan perjalanan tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, tahun 1983 merupakan tahun transisi, yakni transisi dari Pelita III ke Pelita IV. Dengan posisi itu, kiranya tidak mengherankan apabila tahun 1983 diliputi oleh berbagai permasalahan yang cukup rumit dan berat. Sesuai dengan posisi itu, kiranya tepat bila dikatakan bahwa tahun 1983 merupakan tahun konsolidasi.

Kelima, persoalan-persoalan tersebut diatas bukan persoalan yang ringan bila dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia pada tahun 1984 karena dalam tahun 1984 bangsa Indonesia akan memasuki era baru dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yakni era pelaksanaan Repelita IV (1 April 1984). Selanjutnya, sebagaimana diketahui, era Pelita Keempat mendatang merupakan era yang amat penting dan menentukan. Hal ini disebabkan karena dalam Pelita Keempat itu akan diusahakan terciptanya kerangka landasan pembangunan nasional yang kuat dalam rangka persiapan tinggal landasnya pembangunan nasional Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mengingat bahwa tugas tugas tersebut merupakan tugas yang amat berat, satu hal yang perlu ditekankan ialah penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa.

18 Agustus 1945

Titik Tolak Pemahaman Pancasila

SUDIBJO*

Untuk memahami Pancasila sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaannya, ada baiknya kita menengok sebentar ke masa lalu yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan itulah yang antara lain mengisi sejarah bangsa Indonesia. Dengan melihat peristiwa bersejarah masa lalu itu kita dapat mengadakan refleksi atas perjalanan yang telah kita tempuh. Hal ini berguna, bukan untuk mengembalikan atau menenggelamkan kita ke masa yang silam, tetapi justru untuk semakin mengembangkan diri guna mengejar ketinggalan jaman dalam rangka mencapai kemajuan bangsa.

Peristiwa bersejarah yang patut kita tinjau di sini antara lain adalah Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah itu sangat penting artinya bagi kehidupan ketatanegaraan Bangsa Indonesia. Pada tanggal itu PPKI yang anggotanya telah dilengkapi dengan wakil-wakil daerah, mengambil suatu keputusan penting yang menyangkut tata kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.

Pada sidang itu, PPKI mengeluarkan tiga keputusan, yakni: (a) men sahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; (b) memilih Presiden dan Wakil Presiden; dan (c) menetapkan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu Komite Nasional.

Dari tiga keputusan itu, yang pertamalah kiranya yang paling penting. Tulisan ini akan membahas masalah pengesahan dan penetapan Undang-Undang Dasar tersebut. Dalam sidang itu, Bung Hatta besar peranannya

*Staf CSIS.

dalam usaha merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, adalah pada tempatnya bila peranan Bung Hatta itu disinggung pula dalam karangan ini. Juga ada baiknya bila kita mencoba mengaitkan keputusan penting itu dengan situasi politik negara kita dewasa ini berkenaan dengan masalah Pancasila sebagai asas tunggal organisasi kemasyarakatan.

PENGESAHAN DAN PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan nama UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan kemudian disebarluaskan melalui *Berita Republik Indonesia*, Tahun II No. 7, tertanggal 15 Pebruari 1946.¹ UUD 1945 itu terdiri atas tiga bagian, yakni: Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan.

UUD 1945 itu merupakan perbaikan dari rancangan UUD hasil Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritu Zyunbi Tyoosakai). BPUPKI adalah suatu badan yang didirikan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, yang diumumkan pembentukannya pada tanggal 1 Maret 1945 dan tujuannya adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan Negara Indonesia Merdeka seperti dijanjikan oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 7 September 1944.²

BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang I berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dan sidang II dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Dalam sidang yang ke II itu, BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi Negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan. Setelah membahas rancangan Undang-Undang Dasar itu dan mengadakan perubahan-perubahan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan dan

¹*Berita Republik Indonesia* adalah suatu penerbitan resmi Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu, yang terbit tiap-tiap tanggal 1 dan 15, dengan alamat Departemen Penerangan, Jalan Cilacap No. 4, Jakarta.

²Pada sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo tanggal 7 September 1944, PM Koiso mengumumkan pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Lihat Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hal. 15, 16.

menetapkannya menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945).¹

Perubahan yang paling penting menyangkut Pembukaan Undang-Undang Dasar, Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Undang-Undang Dasar rancangan BPUPKI diganti dengan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar buatan Panitia Kecil yang diketuai oleh Soekarno. Meskipun demikian, rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dari Panitia Kecil itu tidak seluruhnya dipergunakan. Kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa." Jadi kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan.²

Di samping itu, rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka yang semula disatukan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar buatan BPUPKI itu dihilangkan, karena Indonesia ternyata telah merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sesuai dengan perubahan yang diadakan di dalam Pembukaan itu, maka beberapa pasal rancangan Undang-Undang Dasar itu pun diubah sebelum disahkan. Sebagai penjelasan Moh. Hatta antara lain mengatakan bahwa karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya, agar kita dapat mewujudkan persatuan yang bulat, pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar.³ Hal itu terjadi pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1. Rancangan Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam" diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli." Kata-kata "yang beragama Islam" dihilangkan. Demikian halnya dengan Pasal 29 ayat 1. Rancangan yang semula berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan.

Selain itu, ada beberapa perubahan kecil. Moh. Hatta mengatakan bahwa perubahan itu hanya untuk efisiensi pada waktu itu. Hal ini terjadi pada Pasal

¹PPKI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, sebagai pengganti BPUPKI.

²Untuk mengetahui lebih jelas rancangan Pembukaan UUD yang dirancang oleh Panitia Kecil dan rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka yang digabungkan dengan Pembukaan UUD hasil rancangan BPUPKI serta Pembukaan UUD 1945 yang disahkan dan ditetapkan oleh PPKI lihat: Muh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945, I* (Jakarta: Siguntang, 1971), hal. 154, 273, 274, 275, 276, 400, 401, 402, 403, 404; Sayuti Melik, "Sankan Paraning Dumadi Pancasila, IV," *Suara Karya*, 25 September 1981.

³Lihat Muh. Yamin, *ibid.*, hal. 399, 400.

4 ayat 1, Pasal 5, Pasal 6 ayat 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 23 ayat 3, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, sehingga akhirnya tersusun dan disepakati rumusan seperti terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini.¹

ARTI PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DILAKUKAN

Perubahan-perubahan yang diadakan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan perubahan yang prinsipil,² bukan perubahan kebetulan ataupun suatu hadiah. Oleh karena itu, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 harus disesuaikan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah disetujui secara bulat oleh sidang lengkap PPKI. Perubahan-perubahan yang maha penting ini menunjukkan semangat bangsa Indonesia, yang tercermin dalam diri para pemimpin perjuangan kemerdekaan pada waktu itu, yakni persatuan. Semangat persatuan itu telah berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang dan semakin diperkuat oleh persamaan pengalaman dan penderitaan di jaman penjajahan.

Semangat persatuan itu telah melahirkan gerakan-gerakan nasional pada awal abad ke-20, seperti Budi Utomo (1908) dan gerakan-gerakan lain, termasuk organisasi-organisasi kepemudaan. Hal ini tampak semakin jelas dengan diadakannya Kongres Pemuda tahun 1928, yang melahirkan Sumpah Pemuda dengan inti "kesepakatan untuk bersatu." Sumpah Pemuda ini antara lain berbunyi:

- "Pertama : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia.
- Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
- Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia."

Setelah mendengar ikrar ini, kongres mengatakan yakin bahwa asas itu wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan di Indonesia. Kongres juga mengatakan yakin bahwa Persatuan Indonesia itu diperkuat dengan

¹Mengenai perdebatan dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, antara lain dapat dilihat Muh. Yamin, *op. cit.*, hal. 399 sampai dengan 437; atau W. Bonar Sidjabat, *Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945* (Jakarta: Sinar Kasih), kutipan dari *Ragi Buana*, No. 52, Mei 1968.

²Lihat Moh. Hatta, *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1979), hal. 460, 461.

memperhatikan dasar persatuannya, yakni Kemauan, Sejarah, Bahasa, Hukum Adat, Pendidikan dan Kepanduan.¹

Dengan keputusan kongres itu, kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan dengan ketunggalikaan. Keanekaragaman tetap ada, tetapi semangat dan pengakuan bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu, yakni Indonesia, telah bulat. Demikian halnya dengan pengakuan atas bendera nasional Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, semangat persatuan semakin kuat.² Pengakuan atas keanekaragaman, seperti adanya bermacam-macam suku bangsa, keturunan, adat-istiadat, kebudayaan, bahasa, agama dan kepercayaan, tidak menghalangi niat untuk bersatu dalam satu negara (tanah air) Indonesia.

Perubahan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat penting artinya bagi perkembangan negara Indonesia karena menyangkut banyak masalah yang berkaitan, seperti ideologi, politik, hukum, ekonomi dan kebudayaan, dan bahkan masalah yang sangat mendasar, yakni pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.³ Sebagai ilustrasi dapat dibandingkan Pasal 1 dan 3 dari Universal Declaration of Human Rights dengan Pembukaan UUD 1945.

Universal Declaration of Human Rights

Pasal 1

Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikurniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

Pembukaan UUD 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pembukaan UUD 1945

... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹Lihat: *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah, 1974), hal. 69.

²Baca St. Sularto, "Wage Rudolf Supratman Menunggu Pelurusan Fakta Sejarah," *Prisma*, Tahun XII, 5 Mei 1983, hal. 76-88.

³Mengenai hak-hak asasi manusia dapat dilihat antara lain dalam Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pantjasila* (Djakarta: Pradnja Paramita, 1969); dan S. Tasrif SH, *Hak-hak Asasi Warga Negara Ditinjau Dari Sudut UUD 1945 dan Perundang-undangan* (Jakarta, 1979).

Demikian pun perubahan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1, di samping merupakan konsekuensi logis dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Teks Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 rancangan BPUPKI menunjukkan adanya diskriminasi, di mana hanya satu agama dan satu golongan mendapat tempat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan agama dan golongan lain dikesampingkan. Hal itu bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan."

Perubahan yang dilakukan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 merupakan pelaksanaan keadilan, yang menghilangkan diskriminasi, demi tercapainya persatuan seperti diidam-idamkan bersama. Kedua pasal ini sebenarnya telah menjadi bahan perdebatan di dalam sidang-sidang BPUPKI. Sehubungan dengan perdebatan itu, pada tanggal 15 Juli 1945, anggota BPUPKI Sukardjo Wirjopranoto menegaskan:

"... apa yang saya kemukakan ialah satu keadilan yang saya percaya - akan diterima dan dihormati oleh segenap rakyat, apapun agamanya, keadilan itu tercantum seterang-terangnya, seindah-indahnya dalam pasal 27 (Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan). Artinya tiap-tiap warga negara mempunyai hak sama di dalam penghidupannya yang sudah tentu dilindungi oleh hukum dan oleh pemerintah.

Pendek kata, di dalam Negara Indonesia tidak ada kelas-kelas, kelas-kelas warga negara. Artinya tidak ada warga negara kelas 1, warga negara kelas 2, inilah keadilan. Konsekuensinya dari keadilan itu ialah bahwa tiap-tiap putra Indonesia berhak juga menempati kedudukan Presiden Republik Indonesia.

Janganlah sebelumnya sudah diadakan suatu pagar, bahwa putra Indonesia yang bukan orang beragama Islam, meskipun ia bijaksana, meskipun ia tinggi budinya, meskipun ia pandai, meskipun ia giat, tidak bisa ia akan menduduki Presiden Indonesia, hanya oleh karena ia tidak beragama Islam."¹

PERANAN BUNG HATTA

Bung Hatta besar sekali peranannya dalam perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 itu. Keteguhan hati, kebijaksanaan dan keluwesannya sangat membantu tercapainya perumusan tersebut.

Sementara orang berpendapat bahwa sikap Bung Hatta untuk mengadakan perubahan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pasal 6

¹Mengenai perdebatan rancangan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1 tersebut di atas antara lain dapat dilihat buku Muh. Yamin, *op. cit.*, hal. 374-388.

ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 itu adalah akibat pengaruh informasi seorang opsir Jepang. Opsir itu mengatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan dengan kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok daripada pokok dan oleh sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar pokok itu hanya mengikat sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun golongan yang terbesar, itu merupakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Oleh sebab itu, bila Pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengandung diskriminasi itu diteruskan, golongan Protestan dan Katolik akan lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.¹

Pertanyaan yang timbul kini adalah, apakah informasi opsir Jepang itu merupakan sebab utama bagi Bung Hatta untuk mendesak para anggota PPKI yang lain untuk menerima perubahan-perubahan tersebut di atas. Mengingat sikap Bung Hatta yang begitu teguh memegang prinsip, pengalaman-pengalaman semasa pergerakan nasional (di masa penjajahan) dan pendidikannya, yang antara lain diperolehnya di Eropa, informasi dari opsir itu kiranya bukan sebab utama. Sikap teguh memegang prinsip itulah kiranya yang menjadi sebab utamanya.²

Sikap teguh memegang prinsip itu kiranya dilatarbelakangi oleh cita-cita luhur Bung Hatta, yang mencita-citakan Indonesia merdeka yang bersatu tanpa pengkotak-kotakan ataupun terpecah-pecah. Hal ini tampak dalam penegasannya seperti berikut:

"Tergambar di muka saya perjuangan saya yang lebih dari 25 tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan, untuk mencapai Indonesia Merdeka bersatu dan tidak terbagi-bagi. Apakah Indonesia yang baru saja dibentuk akan pecah kembali dan mungkin terjajah lagi karena suatu hal yang sebenarnya dapat di atas?"³

Cita-cita Bung Hatta untuk mendirikan negara nasional, yang di dalamnya terdapat pemisahan antara urusan negara dan urusan agama, tampaknya ikut

¹Mengenai hal itu dapat dilihat antara lain dalam Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta: Tintamas, 1970), hal. 57-64; Moh. Hatta, *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1979), hal. 458-461; Sayuti Melik, "Sankan Paraning Dumadi Pancasila, IV," *Suara Karya*, 25 September 1981.

²Untuk mengetahui beberapa pandangan terhadap sikap Bung Hatta lihat *BUNG HATTA Mengabdikan Pada Tjita-tjita Perdjoangan Bangsa* (Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, 1972).

³Lihat Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi*, hal. 58

melatarbelakangi sikap Bung Hatta itu. Cita-citanya itu pernah dilontarkannya pada sidang BPUPKI dan kemudian dijadikan salah satu pegangan oleh anggota BPUPKI Supomo. Supomo mengatakan antara lain, bahwa:

"Oleh anggota yang terhormat tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam."¹

Dalam kesempatan lain, Bung Hatta (semasa masih menjabat Wakil Presiden) pernah menegaskan:

"Janganlah agama dan negara disatukan, sebab kalau begitu, baik negara maupun agama akan haneur. Theokrasi merendahkan agama menjadi perkakas negara..."²

Di samping itu, alasan bakal terjadinya diskriminasi seperti disebutkan di atas ikut melatarbelakangi sikap Bung Hatta tersebut.

Dapat pula ditambahkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 1945, Bung Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Soekarno (Bung Karno).

Di dalam Sejarah Indonesia, kedua pemimpin Indonesia ini terkenal dengan nama Dwitunggal Soekarno-Hatta. Kedua pemimpin ini bahu-membahu dalam memimpin bangsanya. Akan tetapi karena terjadi perbedaan antara kedua pemimpin ini, Dwitunggal Soekarno-Hatta pecah. Sampai sekarang masih kabur, di manakah letak dan inti perbedaan itu. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1956, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Akan tetapi banyak orang Indonesia menghendaki agar Bung Hatta aktif kembali. Di dalam Musyawarah Nasional yang diselenggarakan pada bulan September 1957 dibahas pula "Masalah Dwitunggal Soekarno-Hatta." Demikian juga di DPR, beberapa anggota DPR mengajukan mosi mengenai pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mencari bentuk kerja sama Soekarno-Hatta. Panitia itu dibentuk pada tanggal 29 November 1957 dan dikenal sebagai Panitia Sembilan. Tetapi sampai dibubarkannya pada bulan Maret 1958, panitia ini tidak menghasilkan sesuatu yang konkrit.³

¹Lihat Muh. Yamin, *op. cit.*, hal. 115. Untuk lebih mengetahui pandangan Supomo mengenai negara Indonesia Merdeka lihat pidato Supomo di BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, yang terdapat di dalam buku Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 109-121.

²*Basis*, Tahun V, Oktober 1955 - September 1956, hal. 178.

³Lihat *30 Tahun Indonesia Merdeka* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1977), hal. 339, 362.

BEBERAPA PERSOALAN DEWASA INI

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti pula ditetapkan berlakunya apa yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, yakni Pancasila, sebagai ideologi nasional.

Akan tetapi di dalam masyarakat sekarang ini masih terjadi kesimpangsiuran mengenai Pancasila mana yang harus kita jadikan pedoman hidup bernegara. Hal ini terjadi karena di dalam masyarakat ternyata beredar banyak rumusan Pancasila, yang berbeda satu sama lain. Ada rumusan Pancasila menurut 1 Juni 1945, menurut 22 Juni 1945, menurut Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, menurut Mukadimah Konstitusi RIS maupun Mukadimah UUDS 1950. Manakah yang harus dijadikan pedoman hidup bernegara? Jawabannya cukup jelas, yakni Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarahwan Nugroho Notosusanto mengatakan bahwa rumusan Pancasila yang otentik dan sah adalah rumusan 18 Agustus 1945. Rumusan-rumusan Pancasila lainnya hanya merupakan rancangan sampai terjadinya rumusan seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.¹

Rumusan Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan intisari Pembukaan UUD 1945 tersebut, yang tidak dapat dipisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebagai intisari Pembukaan UUD 1945, Pancasila mempunyai hakikat, sifat dan kedudukan serta fungsi sebagai pokok kaidah fundamental negara. Oleh sebab itu Pancasila mempunyai kedudukan tetap yang terikat dengan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan demikian tidak dapat diubah dengan jalan apapun, termasuk jalan hukum. Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.²

Bila kita menerima Pancasila, maka kita harus menerima semua silanya dalam kesatuan lengkap, dan menghayati serta mengamalkannya, tidak hanya

¹Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981); dan Instruksi Presiden No. 12/1968.

²Dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan: "Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 UUD berwenang menetapkan dan mengubah UUD, karena mengubah Pembukaan berarti pembubaran negara."

sebagai asas perjuangan, tetapi terutama sebagai asas hidup bernegara. Asas hidup bernegara tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dibuang, tetapi harus menjadi pedoman (kompas) menyusun masyarakat Pancasila seperti yang kita cita-citakan sejak 17 Agustus 1945.

Pancasila yang dicantumkan sebagai intisari Pembukaan UUD 1945 dan menjiwai Batang Tubuh UUD 1945 menjadi pedoman untuk menafsirkannya, menjadi pedoman pelaksanaannya dalam undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, menjadi pedoman bagi cita-cita kehakiman dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam masyarakat dan negara. Pancasila menjadi pedoman tertinggi bagi kehidupan kenegaraan dan pembangunan nasional. Pancasila mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan dengan demikian juga dengan negara yang diproklamasikan serta kelangsungannya. Jiwa Proklamasi adalah jiwa Pancasila. Negara yang diproklamasikan adalah Negara Pancasila. Pancasila diwujudkan dalam Proklamasi dan dalam UUD 1945 yang ditetapkan justru untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi.¹

Dengan disahkannya UUD 1945 beserta pembukaannya yang berintikan Pancasila pada tanggal 18 Agustus, maka Pancasila juga menjadi dasar negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan demikian Negara Indonesia bukan negara agama tetapi negara Pancasila. Dalam rapat lobbying tanggal 18 Agustus 1945 ditegaskan bahwa kita tidak akan mendirikan negara agama, tetapi negara yang netral terhadap agama.² Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab). Dengan demikian negara Indonesia bukanlah negara theokrasi, bukan negara agama, bukan negara yang mendasarkan diri pada suatu agama tertentu.³ Pancasila dan UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak ini bukan pemberian negara ataupun pemberian golongan.⁴

Di samping itu, harus pula diingat bahwa negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah negara yang melindungi segenap

¹Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: CSIS, 1981), hal. 9.

²Sayuti Melik, "Sankan Paraning Dumadi Pancasila (IV), Pancasila Dasar Negara," *Suara Karya*, 25 September 1981.

³Sila Ketuhanan Yang Maha Esa; lihat juga *Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, 16 Agustus 1967*, 15 Agustus 1974.

⁴Lihat *Pidato Kenegaraan Pejabat Presiden Soeharto, 16 Agustus 1967*.

bangsa dan seluruh tumpah darah dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.¹

PENUTUP

Bila kita berbicara mengenai Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sudah tentu yang dibicarakan adalah Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila inilah yang sah secara yuridis, baik isi maupun rumusannya, karena Pancasila inilah yang disahkan secara resmi oleh Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai ideologinya.

Oleh karena itu, bila kita mengakui Pancasila sebagai ideologi nasional, maka logikanya Pancasila itu sudah tentu menjadi asas segala tata kehidupan yang berkaitan dengan ketatanegaraan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi asas perjuangan ataupun alat, tetapi terutama sebagai asas hidup bernegara. Oleh sebab itu, dia akan tetap dipegang terus sampai akhir jaman. Oleh karena itu penetapan Tap MPR-RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN, bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas (asas tunggal), bukan merupakan suatu hal yang baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan tanggal 18 Agustus 1945 telah mencanangkan hal itu.

Bila Pancasila diterima sebagai satu-satunya ideologi nasional, mengapa organisasi-organisasi kemasyarakatan tidak mengajukan usul kepada Sidang Umum MPR 1983 yang lalu agar "organisasi-organisasi kemasyarakatan itu juga dikaitkan sekaligus dengan asas tunggal?" Dan kenyataannya sampai saat ini masih ada organisasi kemasyarakatan yang belum bersedia mengakui Pancasila sebagai asas tunggalnya.

Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan apakah tidak diperlukan suatu ketetapan lebih lanjut mengenai asas tunggal itu untuk semakin mempersatukan pandangan mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia.

¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, II.1.

Konsep Manusia Menurut Pancasila

H. CAROKO

Untuk memahami Pancasila sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaannya demi terwujudnya tujuan-tujuan nasional kita seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, selain mengetahui *apakah* sila-sila itu (arti formal maupun materialnya) kita hendaknya juga mengerti *mengapa* sila-sila itu harus dilaksanakan. Dengan mengetahui alasan suatu kewajiban, kita akan lebih bersemangat untuk melakukannya dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.

Kita dapat menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa kita harus melaksanakan Pancasila, karena Pancasila telah ditetapkan sebagai *landasan negara kita*. Jawaban ini tepat, tetapi belum memuaskan karena masih dapat ditanyakan mengapa Pancasila ditetapkan sebagai landasan Republik Indonesia. Pertanyaan ini pada gilirannya bisa kita jawab dengan mengatakan bahwa Pancasila adalah *moral bangsa Indonesia*, tetapi jawaban inipun belum tuntas karena belum terjawab pertanyaan mengapa moral bangsa Indonesia itu (konkritnya Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) harus kita laksanakan. Jawabannya ialah bahwa kelima sila itu baik secara moral atau baik bagi manusia sebagai manusia karena *berakar pada kodrat* (nature) manusia. Dengan demikian kita sampai pada kodrat manusia sebagai sumber Pancasila yang paling dalam.¹

Pertanyaan sekarang adalah apakah kodrat manusia itu. Pertanyaan ini juga bisa dirumuskan: *apakah konsep manusia menurut Pancasila*. Jawaban-

¹Lihat Prof. Dr. N. Drijarkara, "Pancasila dan Religi," dalam *Kumpulan Karangan alm. Prof. Dr. N. Drijarkara S.J.* (Yogyakarta: Kanisius), hal. 135.

nya ialah bahwa manusia itu suatu makhluk yang serba dimensi. Manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. "Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial."¹

Pertama, manusia harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Esa) karena ia adalah makhluk atau ciptaan Tuhan. *Kedua*, manusia harus memperlakukan sesamanya secara adil dan beradab karena setiap orang adalah makhluk pribadi yang mempunyai martabat luhur dan hak-hak asasi. *Ketiga*, manusia harus menjunjung tinggi persatuan negara bangsa (persatuan nasional) karena ia adalah makhluk sosial yang harus hidup dalam hubungan, pergaulan dan kerja sama dengan sesamanya dan dalam rangka itu membentuk satuan-satuan sosial termasuk negara dan hidup sebagai warganya. *Keempat*, manusia harus melaksanakan kerakyatan atau demokrasi karena ia adalah makhluk sosial yang harus hidup dengan sesamanya dalam negara sebagai warganya atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab. *Kelima*, manusia harus melaksanakan keadilan sosial karena ia adalah makhluk sosial yang sebagai warga negara wajib memberikan sumbangannya demi terwujudnya kesejahteraan umum tujuan negara dan sebaliknya berhak mendapatkan bagian yang wajar dari kesejahteraan umum itu untuk membangun kesejahteraan pribadinya.

Konsep manusia menurut Pancasila semacam itulah tema tulisan ini. Secara berturut-turut akan dibahas manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial yang sama hak dan kewajibannya dengan sesama manusia.

MANUSIA MAHLUK TUHAN

Asumsi sila Ketuhanan Yang Maha Esa ialah bahwa manusia adalah *mahluk atau ciptaan Tuhan*. Walaupun manusia pada umumnya mengetahui kebenaran itu lewat ajaran agama atau tradisi kelompoknya, berkat akal budinya ia bisa sampai pada kesimpulan itu lewat suatu pemikiran yang saksama mengenai diri dan alam semesta. Dalam tata alam semesta ini manusia menyadari bahwa ia adalah untuk diri sendiri - kesempurnaan dan kesejahteraan pribadi - dan segala sesuatu lainnya untuk dirinya dalam arti bahwa manusia dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan pribadinya. Dengan akal budinya manusia dapat mengenal segala sesuatu di dunia ini dan

¹Ketetapan MPR RI No. II/MPR/78 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, selanjutnya disingkat P-4.

dari kodrat masing-masing menjabarkan hubungan antara mereka dan dari situ menjabarkan lebih lanjut apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya. Dengan demikian manusia adalah puncak dan pusat alam semesta.

Akan tetapi manusia juga menyadari bahwa dirinya (dan segala sesuatu lainnya dalam tata alam semesta) *dijadikan*, dan oleh sebab itu *tidak mutlak adanya*, tetapi *relatif, terbatas dan tergantung*. Dengan demikian manusia harus menerima adanya Yang Mutlak, Yang Maha Ada yang bukan sesuatu melainkan Pribadi Yang Maha Sempurna. Itulah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan asal dan tujuan segala sesuatu lainnya, termasuk manusia.¹ Sehubungan dengan itu dalam bahasa Jawa Tuhan disebut "sangkan paraning dumadi" artinya asal dan tujuan segala sesuatu yang diciptakan.

Berdasarkan kesadaran itu, manusia mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai *penciptanya dan tujuan eksistensinya* dan memuliakan-Nya baik dalam hati dan kata-kata (sembahyang) maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Itulah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam P-4 ditegaskan: "Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab."

MANUSIA MAHLUK PRIBADI

Asumsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah bahwa manusia itu adalah mahluk Tuhan yang mempunyai *harkat dan martabat yang luhur* berkat kodratnya sebagai mahluk berakal budi atau *mahluk rasional*. Manusia adalah kesatuan badan dan jiwa yang bersifat rohani dan dilengkapi dengan akal budi dan kehendak merdeka. Berkat badannya manusia adalah bagian alam semesta, tetapi berkat jiwa rohaninya ia melampauinya. Jiwa rohaninya itu membedakan manusia dengan segala sesuatu lainnya dalam alam semesta ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *jiwa rohani itu merupakan kekhususan manusia* dan menempatkannya sebagai pribadi.²

Pribadi pada umumnya adalah lawan barang atau benda. Definisi klasiknya diberikan oleh Boethius dan berbunyi: "Pribadi adalah substansi individual yang bersifat rasional."³ Dalam definisi ini "substansi individual"

¹ Lihat *Kumpulan karangan alm. Prof. Dr. N. Drijarkara S.J.*, hal. 146-155.

² *Ibid.*, hal. 16-36.

³ Dalam bahasa Latin aslinya: "Persona proprie dicitur naturae rationalis individua substantia." Lihat bukunya *De Duabus Naturis*.

mengungkapkan persamaan manusia dengan barang, sedangkan "sifat rasional" menggarisbawahi kekhususan pribadi sebagai lawan barang. Yang pertama menunjuk pada eksistensi mandiri dan yang kedua pada eksistensi pribadi (personal).

Substansi individual atau individu adalah apa yang mandiri dengan suatu kodrat (nature) tertentu. Karena substansi berarti kodrat yang dalam segala sesuatu menentukan "ada substansial" atau sesuatu itu sendiri yang dari kodratnya menerima "ada pertamanya". Jadi "individual" ditambahkan pada "substansi" untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah substansi pertama, bukan kodrat itu sendiri (substansi kedua), melainkan apa yang dimiliki sesuatu berdasarkan kodratnya.

Substansi individual tidak dapat dibatasi lebih lanjut, tetapi hanya bisa dilukiskan dalam *ciri-ciri esensialnya*. Substansi individual pertama-tama adalah sesuatu yang *lengkap*, suatu keseluruhan yang tertutup dan lengkap, dan menolak "cara ada" bagian. Kedua, ia *mandiri* dan merupakan subyek segala bentuk kesempurnaan. Hal ini menolak "cara ada" forma yang terwujud di berbagai subyek, tetapi hanya bisa berada sebagai bagian suatu subyek. Akhirnya ia adalah sebagai sesuatu yang *dibedakan* atau *terpisah*. Ia berada tersendiri, tidak ditampung dalam suatu keseluruhan lain.

Pribadi adalah suatu substansi individual, tetapi mewujudkan kemandiriannya itu dengan caranya sendiri: menurut tuntutan-tuntutan esensi kodrat rasional (rational nature). Pribadi bukan saja sesuatu yang mandiri, tetapi juga seorang yang bertindak dari dirinya sendiri. Kemandirian mengungkapkan dirinya pada pribadi dalam tindakan-tindakan mandiri atau otonom.

Kalau pribadi mandiri dengan caranya sendiri, maka ia harus juga mewujudkan ketiga pembatasan kemandirian itu dengan caranya sendiri. Sebagai sesuatu yang bertindak secara mandiri, ia bukan saja mandiri secara lain dari cara mandiri mahluk-mahluk yang tidak bebas, tetapi juga secara lain melaksanakan keutuhan dan ketersendirian substansi individual. Seperti hewan, manusia lahir sebagai suatu keseluruhan alamiah individual, suatu struktur harmonis fungsi-fungsi kehidupan biologis. Tetapi tidaklah di situ terletak keutuhan khas pribadi. Ini adalah keadaan harmoni dan integrasi intern yang harus dicapai manusia lewat *kenal-diri dan disiplin*, dan yang tidak pernah dicapai sepenuhnya. Sebagai bayi, saya belum mempunyai jarak intern terhadap nafsu-nafsu dan daya-daya tubuh saya dan saya juga belum menguasai dan mengaturnya dengan kemauan saya. Tetapi sejauh saya, dengan bimbingan orang lain, dengan hidup dan bertindak menjelajahi tubuh

saya, mengerti permainan dan makna kekuatan-kekuatan badan saya dan belajar menguasai dan membimbingnya, seolah-olah saya mengumpulkan bagian-bagian saya menjadi suatu keseluruhan harmonis yang baru *di bawah pimpinan kebebasan rasional saya*. Keadaan pengutuhan, konsentrasi dan integrasi intern itu kini disebut *kepribadian* (persoonlijkheid).

Juga ketersendirian eksistensi pribadi bagi manusia adalah *suatu tugas dan kemenangan yang berangsur-angsur*. Individualitas, yang dalam keseluruhan kodrat yang ada hanya merupakan sesuatu yang terpisah, yang disebabkan potongan materi tempat saya berada, dalam pribadi menjadi kemerdekaan eksistensi bebas yang meningkat, otonomi keputusan-keputusan saya, penerimaan sukarela tanggung jawab yang tidak bisa dipindahkan, yang diletakkan pada saya oleh kehidupan saya. Di situ terletak ketersendirian pribadi.¹

Dalam *personalisme*, dewasa ini istilah-istilah *individu*, *pribadi* dan *kepribadian* berarti seluruh manusia tetapi dalam segi yang berbeda-beda dan pada tatanan yang berbeda-beda dilihat sebagai *bekal semula*, sebagai *tugas* dan sebagai *perwujudan*. Manusia lahir sebagai suatu keseluruhan organis kebutuhan-kebutuhan hidup, nafsu-nafsu dan kekuatan-kekuatan. Dalam segi itu ia tidak berbeda dengan hewan. Keseluruhan organis itu tetap merupakan suatu segi hidupnya. Dilihat secara demikian manusia disebut *individu*. Bidang individu adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis itu. Tetapi manusia lebih dari itu. Organismenya sendiri menunjukkan suatu kekaburan, keterbukaan dan ketidakpastian yang memungkinkan dan minta suatu penyelesaian dan pembentukan lebih lanjut. Manusia adalah suatu kemungkinan untuk pengutuhan yang lebih tinggi, suatu kemungkinan yang bagi dirinya sendiri merupakan suatu *tugas dan panggilan*. Kalau keseluruhan manusia itu di lihat dalam keterbukaannya, sebagai kemungkinan dan panggilan, kita bicara tentang *pribadi*. Dalam eksistensi pribadi itu terletak kekhususan manusia dan harkat setiap orang. Suatu perwujudan tugas manusia yang berhasil itu disebut *kepribadian*. Individu, pribadi dan kepribadian itu merupakan suatu kesatuan dinamis. Manusia adalah pribadi, dipanggil untuk naik dari tatanan individu ke tatanan kepribadian dengan menghimpun kekuatan-kekuatan individualitasnya ke dalam wilayah kekuasaan kemerdekaannya lewat jalan *pemahaman dan latihan*.

Dengan demikian kepribadian adalah *perwujudan tugas* dalam pribadi secara berhasil. Dengan kepribadian kita maksudkan seorang yang *paripurna*. Ia tahu apa yang dipikirkannya, ia mempunyai suatu keyakinan pribadi yang kuat. Ia tahu apa yang diinginkannya, ia tetap dirinya sendiri. Ia menguasai segala kekuatan dalam dirinya dalam rangka pelaksanaan rencana hidupnya.

¹Lihat J.H. Walgrave, "Persoon," dalam *Theologisch Woordenboek* (Roermond dan Maaseik, 1958), Jilid 3, hal. 3828-3839.

Ia tidak berubah dari hari ke hari. Ia memberikan kesan tidak berubah. Ia tidak tenggelam dalam massa. Ia tidak berubah dengan berubah-ubahnya pendapat umum yang dangkal. *Ia tetap setia pada dirinya sendiri, pada cita-citanya, keyakinan-keyakinan dan rencana-rencananya*, betapa berubah-ubahpun perasaannya, afeksi hatinya, dorongan kodratnya, dan bagaimanapun reaksi orang-orang lain, perubahan-perubahan dalam keadaan dan pendapat umum. Ia berdiri di atas perubahan-perubahan alam dan lingkungannya. Ia mengerti permainannya, menguasainya dan dapat menggunakan dan membimbingnya, lagi pula mampu menyesuaikan diri tanpa mengorbankan dirinya. Jadi dalam segala sesuatu ia ditandai suatu *kesatuan yang mantap*. Di situ juga terletak kemerdekaan sejati, bukan suatu kebebasan keterbukaan dan kemungkinan semata-mata, melainkan suatu kemerdekaan perwujudan dan kekuasaan: *penguasaan atas tindakan-tindakannya*. Kepribadian dapat diperhitungkan dan diandalkan karena ia bebas dan bertanggung jawab dalam pemilikan diri yang penuh.

Akan tetapi di samping kemerdekaan dan pemilikan diri itu diperlukan *orientasi pada suatu cita-cita, suatu nilai kehidupan yang paling tinggi*. Kehidupan seorang dengan kemauan baja, seorang yang secara sempurna memiliki dirinya sendiri, masih bisa tidak konsisten, tidak karena terbelah nafsu-nafsunya, tetapi karena ia tidak tahu mengapa ia hidup dan menggunakan kekuatan-kekuatannya. Jadi diperlukan sesuatu di atasnya, untuk mana orang membebaskan dirinya. Kepribadian sejati adalah orang yang memiliki dirinya sendiri dalam kemerdekaan, tetapi pada waktu yang sama *tunduk secara sukarela pada Tuhan* sebagai nilai tertinggi. Dengan demikian kepribadian adalah *kepribadian moral*: manusia yang hidupnya disatukan demi suatu tujuan moral, nilai tertinggi yang akan dilayannya.¹

MANUSIA MAHLUK SOSIAL

Asumsi sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa manusia adalah juga *mahluk sosial* yang saling membutuhkan dan dapat saling membantu dan saling melengkapi, dan sehubungan dengan itu harus hidup bersama dan bekerja sama baik secara lepas maupun secara permanen dalam satuan-satuan sosial yang menetap. Hal itu ditandaskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB: "Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan hanya di situ ia dapat mengembangkan dirinya secara merdeka dan penuh."²

¹*Ibid.*

²Pasal 29 ayat 1.

Oleh sebab itu sebagai suatu keharusan manusia *membentuk satuan-satuan sosial* atau masyarakat (society). Pria dan wanita menikah dan membentuk keluarga, satuan sosial dasar yang paling kecil. Selain itu orang mendirikan desa, kota, propinsi, perkumpulan dagang, olahraga, kesenian dan bermacam-macam organisasi. Alasannya ialah bahwa untuk mengemban tugas atau panggilan hidupnya dengan wajar dan mewujudkan kepribadian, manusia tidak mencukupi dirinya sendiri melainkan *memerlukan sesamanya*.

Akan tetapi keluarga dan lain-lain satuan sosial yang bersumber pada kemauan bebas manusia untuk hidup bersama dan bekerja sama, belum dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya selengkapya. Maka pada tingkat perkembangan tertentu, manusia memerlukan satuan sosial yang lebih besar yang mampu menangani segala urusan bersama untuk menjamin kesejahteraan umum dalam arti kesejahteraan lahir batin untuk semua warganya. Satuan sosial semacam itu adalah *negara*. Sejumlah orang bersama-sama membentuk negara untuk menjamin kesejahteraan umum, yang tidak dapat diwujudkan oleh mereka masing-masing maupun satuan-satuan sosial yang lebih kecil dan terbatas ruang lingkup dan jangkauannya. Dengan demikian negara adalah suatu keharusan dalam arti bahwa manusia harus membentuknya dan hidup sebagai warganya atas dasar persamaan hak dan kewajiban.¹

Oleh sebab itu negara kiranya dapat dibatasi sebagai satuan sosial atau organisasi yang *mengatur hubungan-hubungan antara para warganya* dengan kekuasaan demi tercapainya kesejahteraan umum. Yang dimaksud dengan organisasi adalah sekelompok orang yang dengan *pembagian tugas dan kerja sama* mengejar suatu tujuan bersama. Lewat pembagian tugas itu setiap anggotanya mempunyai tugas tertentu dalam rangka keseluruhan yang biasa disebut fungsi. Selanjutnya kerja sama demi tercapainya tujuan bersama itu pertama-tama dijamin dengan adanya *pembagian tugas* yang jelas dan terarah pada tujuan bersama itu, dan kedua dengan adanya *pimpinan* yang memberikan bimbingan, melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan para anggota dan mengadakan pengawasan agar segala sesuatu berjalan dengan baik dan masing-masing anggota mendapatkan bagian wajar dalam beban maupun hasil usaha bersama. Setiap organisasi mempunyai pucuk pimpinan yang diserahkan kepada seorang atau sekelompok petugas tertinggi. Dalam organisasi negara pucuk pimpinan itu adalah pemerintah dalam arti yang luas yang mencakup badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tugasnya

¹Mengenai perlunya negara bagi manusia lihat lebih lanjut J.D. Mabbott, *The State and the Citizen* (London, 1970), hal. 97-107; dan Eberhard Welty, *A Handbook of Christian Social Ethics* (London, 1963), Jilid 2, hal. 198-199.

ialah mengatur agar organisasi dengan bagian-bagiannya berjalan dengan lancar dan mengejar tujuan bersama dengan cara yang tepat dan efisien.

Selanjutnya negara mengatur hubungan-hubungan antara para warganya *dengan kekuasaan*. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan masyarakat yang bersangkutan masyarakat kekuasaan (*gezagsgemeenschap*). Dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya kesejahteraan umum, negara dapat memaksa para warganya dengan mengancam atau menggunakan kekerasan fisik sejauh perlu agar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusannya dilaksanakan.²

Dengan demikian *negara bukanlah tujuan*. Seperti satuan-satuan sosial lain, negara adalah untuk kepentingan para warganya. Tujuan negara sudah barang tentu lebih daripada kepentingan-kepentingan para warganya dalam arti bahwa tujuannya itu ialah kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat. Namun bukanlah undang-undang, lembaga-lembaga, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang merupakan *titik tolak dan tujuan negara*, melainkan *manusia* dengan martabatnya, tujuan-tujuannya kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajibannya. Tiada kesejahteraan umum selain kesejahteraan lahir batin orang-orang. Memajukan kesejahteraan umum tak lain ialah memajukan perkembangan orang-orang itu dan meningkatkan harkat mereka. Negara mengusahakan kondisi yang diperlukan oleh para warganya untuk mengembangkan diri dan bakat-bakat mereka sependek mungkin.³

Unsur-unsur pokok kesejahteraan umum itu di satu pihak adalah *dihormatinya hak-hak* orang-orang atau kepastian hukum (*security*) dan di lain pihak *tersedianya barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup* bagi semua anggota masyarakat dan negara atau kemakmuran umum (*public prosperity*). Dalam rangka itu negara harus menegakkan hukum dan keadilan di satu pihak dan menjamin agar barang-barang dan jasa-jasa tersebut tersedia bagi semua orang di lain pihak.⁴ Sehubungan dengan itu, negara juga wajib menjaga agar rakyat banyak memiliki daya beli secukupnya dan harga-harga seimbang dengan daya beli rakyat itu. Oleh sebab itu negara wajib memberikan prioritas tinggi kepada *penempatan seluruh tenaga kerja* (*full employment*) dan dalam rangka itu menyusun serta melaksanakan suatu strategi penciptaan

¹Lihat J.H.A. Logemann, *Het Staatsrecht van Indonesie* ('s-Gravenhage - Bandung, 1955), hal. 17-18.

²*Ibid.*

³Lihat Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (Oxford, 1967), hal. 47, 123, 133; lihat juga Jacques Maritain, *Man and the State* (Chicago-London, 1971), hal. 12-13.

⁴Lihat J. Hellin dan I. Gonzalez, *Philosophiae Scholasticae Summa* (Madrid, 1957), Jilid 3, hal. 97-107.

kesempatan kerja yang memadai sehingga setiap orang yang mampu dan mau bekerja dapat bekerja secara produktif sesuai dengan kecakapan dan keinginannya.¹ Sesuai dengan itu, dalam pasal 27, UUD 1945 ditetapkan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Manusia tidak dapat hidup sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan balas karya yang wajar sekalipun dicukupi kebutuhan materialnya sehari-hari. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi melainkan juga nilai kemanusiaan yang tinggi. Bersamaan dengan itu negara wajib menjaga agar orang dapat bekerja dalam lingkungan sehat dengan syarat-syarat kerja yang baik dan mendapatkan balas karya yang wajar. Bagi kebanyakan orang kesempatan kerja adalah satu-satunya sumber kesejahteraan diri dan keluarga mereka. Oleh sebab itu perlu ditetapkan *upah minimum* yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dalam hubungan ini negara wajib menjaga agar tidak terjadi pemerasan tenaga kerja oleh majikannya.

Pendek kata, sebagai mahluk sosial manusia *pertama* harus *membentuk masyarakat termasuk negara dan hidup sebagai warganya*. Dalam kedudukannya ini ia wajib menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini berarti bahwa ia harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Karena kerelaan berkorban demi kepentingan bersama ini menuntut adanya cinta kepada bangsa dan negara atau patriotisme, maka perlu dibina kesadaran dan kebanggaan nasional. Akan tetapi karena bangsa dan negara merupakan bagian umat manusia, maka disamping itu perlu dikembangkan kesadaran internasional dan perjuangan untuk membangun dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bangsa harus hidup bersama dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain sebagai sesama anggota umat manusia, bukan saja untuk kepentingan bersama, melainkan juga demi terwujudnya dunia baru semacam itu. Nasionalisme harus bergandengan dengan internasionalisme dalam suatu perimbangan yang tepat.²

Kedua, sebagai warga negara yang sama hak dan kewajibannya dengan sesama warga negara manusia ikut *bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya* "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."³ Selain itu ia wajib menerima dan memperlakukan setiap orang In-

¹Lihat lebih lanjut *The World Employment Programme* (Jenewa: 1971), khususnya hal. 5-19.

²Lihat P-4.

³Pembukaan UUD 1945.

donesia sebagai *sesama warga negara dengan persamaan hak dan kewajiban*. Oleh sebab itu ia wajib menghormati keyakinan dan pendapat sesama warga negara biarpun mungkin tidak menyetujuinya sesuai dengan ketentuan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat tanpa gangguan untuk mencari, menerima dan menyalurkan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan sarana apapun dan tidak perduli batas-batas (negara)."¹ Ia juga wajib *ikut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara*, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan sesama warga negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama mengutamakan musyawarah, menerima serta melaksanakan keputusan yang diambil bersama, terutama hukum nasional, termasuk UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR dan peraturan-peraturan perundangan lain sebagai keputusan bersama rakyat.

Ketiga, sebagai warga negara manusia wajib memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan *memberikan sumbangannya* sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum itu. Khususnya ia wajib *mematuhi peraturan-peraturan perundangan* yang ditetapkan oleh negara sebagai sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum itu, khususnya membayar pajak secara jujur. Selain itu ia wajib ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam ekonomi dan mendapatkan bagian yang wajar dari pendapatan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga masing-masing.² Dengan demikian ia wajib ikut memperjuangkan agar negara menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, dan memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.³ Dalam rangka itu ia wajib ikut memperjuangkan agar disusun dan dilaksanakan *perundang-undangan sosial*, yang di banyak negeri ternyata merupakan salah satu cara yang efisien untuk menjamin meratanya kesejahteraan.⁴

¹Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB.

²Lihat Kirdi Dipoyudo, "Arti dan Isi Keadilan Sosial," dalam *Analisa*, Agustus 1980.

³Lihat pasal-pasal 33 dan 34.

⁴Lihat lebih lanjut Kirdi Dipoyudo, "Negara Kesejahteraan Orientasi Pembangunan," dalam *Analisa*, Mei 1981; William Ebenstein, "Social Reform Programs, 1918-1956," dalam *Encyclopaedia Americana* (New York, 1971), Jilid 23, hal. 186 dst.; dan William A. Robson, *Welfare State and Welfare Society* (London, 1976), hal. 11-19.

PENUTUP

Sebagai ringkasan dapat dikatakan bahwa menurut filsafat Pancasila manusia adalah *mahluk Tuhan yang sekaligus bersifat pribadi dan sosial*. Di satu pihak Pancasila menjunjung tinggi martabat luhur manusia dan hak-hak asasinya, tetapi di lain pihak juga menggarisbawahi persamaan hakiki semua orang dan dimensi sosial manusia. Dengan demikian Pancasila adalah filsafat yang menempuh jalan tengah antara *individualisme* yang terlalu menonjolkan hak-hak individu termasuk kebebasan-kebebasannya dan *kolektivisme* yang secara berlebihan menonjolkan masyarakat dan negara seolah-olah individu ditelan olehnya. Pancasila memperhatikan dimensi individual dan dimensi sosial manusia dalam suatu keseimbangan yang tepat dan oleh sebab itu dapat disebut *personalisme*. Dalam filsafat ini manusia diakui sebagai persona atau pribadi otonom yang dikaruniai martabat luhur dan hak-hak asasi yang tak berpindahkan, tetapi juga sebagai mahluk sosial sampai pada akar-akarnya.

Hal itu *pertama* berarti bahwa manusia tidak boleh diperalat, akan tetapi harus diperlakukan sebagai pribadi yang merupakan subyek martabat luhur dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh sesamanya maupun oleh masyarakat dan negara. Sebagai pribadi, manusia menduduki tempat sentral dalam masyarakat dan negara maupun dalam pembangunan, bukan saja sebagai *pelaku atau subyek* melainkan juga sebagai *tujuan*.

Kedua, hal itu bukan saja berarti bahwa hanya dalam masyarakat manusia dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya menjadi kepribadian atau manusia paripurna dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya, melainkan juga bahwa *kebesaran sejatinya terletak dalam orientasinya pada sesama dan perjuangannya untuk kesejahteraan sesama*. Manusia yang sempurna adalah manusia yang terbuka sepenuhnya untuk sesama dan memperlakukan sesama sebagai dirinya sendiri. Hal ini terungkap dengan baik dalam istilah Jawa "tepo saliro", artinya tenggang rasa. Rumusan negatifnya adalah "janganlah melakukan terhadap sesama apa yang tidak anda inginkan untuk diri anda sendiri" dan rumusan positifnya "lakukan terhadap sesama apa yang anda inginkan untuk diri anda sendiri." Itulah juga inti hak-hak asasi seperti dirumuskan secara terperinci dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB. Manusia tidak hanya berhak menuntut agar martabat dan hak-haknya dijunjung tinggi oleh sesamanya maupun masyarakat dan negara, melainkan juga wajib menjunjung tinggi martabat dan hak-hak sesamanya.

Sampai batas-batas tertentu, pokok-pokok pikiran itu juga terdapat dalam *humanisme* dan diperjuangkan oleh para penganutnya. Pada hemat kami, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara kita juga diilhami oleh ide besar dunia itu. Oleh sebab itu, untuk memahami Pancasila dalam rangka pelaksanaannya kiranya juga bermanfaat untuk mempelajari pokok-pokoknya.

